

Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

(Studi Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ABDUL RISYAD

NIM. 135030107113023



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar

Umar Bin Khattab RA

Orang berakal bukan berarti bisa mengenali mana mana yang baik dan buru. Tetapi berakal adalah bisa mengetahui mana yang lebih baik diantara dua hal buruk.

Ummar Bin Khattab RA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi
(Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
di Provinsi DKI Jakarta. (Studi pada Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk)

Disusun oleh : Abdul Risyad

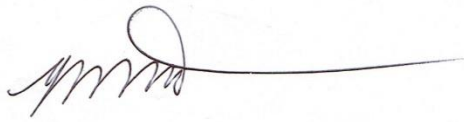
NIM : 135030107113023

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 4 Desember 2017

Ketua Pembimbing



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Malang, 4 Desember 2017

Anggota Pembimbing



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIP. 2012018301291001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Januari 2018
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Abdul Risyad
Judul : Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi
(Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk).

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



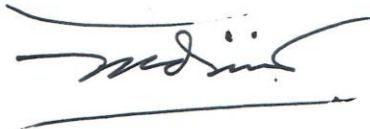
Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIP. 2012018301291001

Anggota



Dr. Mardiyono, MPA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar sarjana akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalakan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003), (Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 4 Desember 2017



Abdul Risvad
NIM. 135030107113023

RINGKASAN

Abdul Risyad, 2017, **Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk)**. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Drs. Minto Hadi, M.Si, Nurjati Widodo, S.AP, M.AP.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pos pelayanan teknologi (posyantek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posyantek (pos pelayanan teknologi) adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna (TTG) adalah budaya, dan ekonomi masyarakat yang menggunakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang memuat program pemberdayaan dari tahun 2013-2017, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui posyantek, serta menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan hanya dibatasi oleh tiga fokus penelitian, yaitu, (1) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. (2) Tujuan Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat. (3) Sasaran Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data penelitian yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan melalui proses data *collection*, data *condensation*, data *display*, dan *conclusion*.

Program posyantek dalam penelitian ini memberi dampak yang sangat baik bagi pemberdayaan masyarakat dalam mengenalkan teknologi tepat guna (TTG). Posyantek menginformasikan, menjembatani dan memafasilitasi masyarakat sebagai pengguna teknologi tepat guna dengan sumber teknologi tepat guna, sehingga masyarakat dapat mengelola sumber daya lokal dengan berwawasan lingkungan. Adanya pemberdayaan masyarakat melalui posyantek membuat penemuan baru dan inovasi-inovasi masyarakat untuk mengembangkan teknologi, kegiatan masyarakat menjadi efisien dan dapat menumbuhkan pendapatan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi hendaknya memberikan aksi nyata terhadap keberadaan posyantek. Serta pengurus posyantek dan masyarakat untuk dapat melaksanakan peran, fungsi, dan partisipasi dalam pelaksanaan posyantek yang ada di kecamatan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Posyantek, Teknologi Tepat Guna.

SUMMARY

Abdul Risyad, 2017. **The Implementation of Posyantek in an Increased Community Empowerment of DKI Jakarta** . Public Administration Department, Faculty of Administrative Science. University of Brawijaya. Advisor: Drs. Minto Hadi, Si, Nurjati Widodo, S.AP, M.AP.

Provincial Government of Jakarta undertake community empowerment through posyantek to improve the well-being of society. Posyantek (technology service posts) is an association of districts that provide technical services, information and orientation of the various types of appropriate technology. Appropriate technology is a cultural, economic and people who use it. The purpose of this study was to determine and description of Strategic Plan (Sentra) Office of Empowerment, Child Protection and Control Population Jakarta containing the empowerment program of the year 2013 - 2017, the implementation of community empowerment through posyantek, and analyze the supporting factor and inhibiting factors of community empowerment through posyantek in Jakarta.

This research is the qualitative research and only use limited three research focus, similiar (1) Strategic Plan of the Departmen Empowerment Child Protection and Population Control of jakarta (2) Objectives of the Program (Posyantek) in the community empowerment. (3) Target of the Program (Posyantek) in the community empowerment. Supporting factors and restricting factors implementation program posyantek in the improvement of community empowerment in DKI Jakarta. The source of the data in this study consists of primary data and secondary data. In analyzing the study data used are descriptive data analysis through the process of data collection, data condensation, data display, and a conclusion.

Posyantek program in this study gives a very good impact for community empowerment in introducing appropriate teknonologi. Posyantek is for inform, bridging and facilitate community as the user of appropriate technology with appropriate technology, so that the community can manage local resources with environmentally. The existence of community empowerment through posyantek to make new discoveries and innovations-innovation of community to develop technology, community activities become efiesien and community income can grow. The central government and local government as regulators should provide concrete actions for posyantek. As and participate well in the implementation of posyantek in the district.

Key Words: Posyantek, Community Empowerment, Appropriate Technology.

KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat sehat dan hidayah nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar yang berjudul **“Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) ”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta, MDA, PH.d selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Nurjati Widodo, S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pebimbing yang telah berkenan memberikan waktu, nasehat dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang berguna bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir.
6. Seluruh staf Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu penulis di dalam menyusun skripsi.
7. Ibu Rani, Pak Aqil dan Pak With selaku salah satu ketua posyantek di DKI Jakarta yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
8. Untuk kedua orang tua saya Ibu Almauthia dan Ayah Zainuris, yang telah memberikan motivasi, telah merawat, mendidik. Ayah dan ibundaku yang telah mengajarku tentang pentingnya dalam menjalani hidup terima kasihku tak terhingga.
9. Untuk saudara penulis Rizka Istahthi dan Shafiyah serta untuk semua keluarga dari Penulis. Terimakasih untuk selalu menjadi motivator dalam menyelesaikan studi Penulis.
10. Untuk Seluruh Keluarga Indoneis Future Leaders Chapter Malang selaku organisasi yang membantu saya untuk mengembangkan diri. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang di berikan sehingga terselesaikan skripsi ini.
11. Untuk Pamejoy, Gubder, dan arek-arek kontrakan kalisongo yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam proses pembuatan Skripsi ini.
12. Untuk sahabat saya Apri Sutrisna, Ibnu, Doni Wildan, Kahfi, Rizki Ramadheni, Fadlika Paron, Zulrahman Akbar, Rizki Emirdhani Utama, Pandu Arya Wirawan, Mamet Widodo, Idan, Jal Bayu, Bimo, Putra, Rizki Adila, Alvin, Robby Rofandi, Nazar Adam, Gede, Rizal, Sani, Muhammad Shan, Dhea Ayu, Fathiya Fadila, Alfath Utomo, Jeremia Arthur, Miftah Amin.

13. Seluruh teman-teman Administrasi Publik 2013 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Terimakasih atas bantuan maupun dukungan yang di berikan sehingga terselesaikan skripsi ini

14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang besar bagi penulis dan semua pembaca.

Malang, 4 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
1. Secara Akademis	10
2. Secara Praktis	11
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Proses Kebijakan Publik	17
B. Model-Model Implementasi Kebijakan	18
1. Implementasi Kebijakan Model Merile S. Grindle	19
2. Implementasi Kebijakan Publik Model Hogwood dan Gunn	20
3. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn	21
4. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier	24
5. Implementasi Kebijakan Publik Model C. Edward III	25
C. Implementasi Program	30
1. Pengertian Implementasi Program	30
2. Unsur-Unsur dalam Implementasi Program	32
D. Pemerintah Daerah	33
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	33
2. Peran Pemerintah Daerah.....	35
E. Pelayanan Publik	35
F. Teknologi	37
1. Teknologi	37

2. Konsep Teknologi Tepat Guna	38
G. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	39
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	39
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	42
3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	44
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian	49
D. Sumber data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrument Penelitian	53
G. Analisis Data	55
H. Keabsahan Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta	58
2. Gambaran Umum DPPAPP Provinsi DKI Jakarta	63
a. Visi dan Misi	64
b. Dasar Hukum	64
c. Tugas Pokok dan Fungsi	65
d. Kewenangan	66
e. Susunan Organisasi	67
f. Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)	72
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	85
1. Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.	85
a. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat	85
b. Tujuan Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat	91
c. Sasaran Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat	100
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) Dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	108
a. Faktor Pendukung	108
b. Faktor Pemghambat	112
C. Pembahasan dan Analisis Data	117
1. Implementasi Program Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.	117
a. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dalam	

mendukung Pemberdayaan Masyarakat	121
b. Tujuan Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.. ...	126
c. Sasaran Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat	129
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Implementasi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) Dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	132
a. Faktor Pendukung	132
b. Faktor Penghambat	136

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA.....	146
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015.....	6
2	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015.....	7
3	Luas Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	59
4	Pemberdayaan Posyantek di Kecamatan Kembangan.....	103

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	27
2	Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanania dan Paul Sabaiter.....	31
3	Implementasi Kebijakan model Goerge C. Edward III.....	31
4	Analisis Data Model Interaktif.....	56
5	Peta Administratif Provinsi DKI Jakarta.....	58
6	Lambang Kota Jakarta.....	63
7	Struktur Organisasi DPPAPP DKI Jakarta.....	67
8	Bagan Alur Tranfer Teknologi Tepat Guna.....	77
9	Tujuan Teknologi Tepat Guna.....	78
10	Struktur Organisasi Posyantek.....	80
11	Ruang Sekretariat Posyantek Provinsi DKI Jakarta.....	84
12	Hasil Posyantek Kecamatan Kembangan.....	102
13	Hasil Posyantek Kecamatan Kembangan.....	104
14	Hasil Posyantek Kecamatan Jagakarsa.....	106
15	Stand Posyantek Kecamatan Jagakarsa di Pameran Flora & Fauna Tahun 2017.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administasi.....	148
2.	Surat Izin Penelitian Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Adminstrasi Jakarta Timur	149
3.	Surat Ketentuan Penelitian.....	150
4.	Dokumentasi Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	151
5.	Dokumentasi Penelitian Pada Dinas Posyantek Kembangan Jakarta Barat Dan Posyantek Jagakarsa Jakarta Selatan.....	152
6.	Interview Guide.....	155
7.	Program Posyantek dalam Rencana Strategis DPPAPP Tahun 2013-2017.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Menurut Apriliani, dkk. (2014:9), merupakan suatu usaha pemerintah yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas manusia, khususnya masyarakat Indonesia di seluruh wilayah tanah air. Pelaksanaan pembangunan nasional harus selaras dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu landasan dan alat bedah bagi daerah agar bisa berkembang mandiri, baik dari peranan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan sosial yang ada di daerah itu sendiri. otonomi daerah Menurut Mudrajat (2010:5), diharapkan mampu menjadi motivator bagi pemerintah daerah agar dapat mandiri dalam segala aspek, terutama dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan otonom dituntut agar dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat yang dapat dilakukan dengan mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan masyarakat juga penyertaan peran serta masyarakat yang lebih optimal (Kaho, 2000:24).

Munculnya Pemberdayaan masyarakat Menurut Mardikanto (2010: 36), dikarenakan adanya suatu kondisi sosial, ekonomi, teknologi masyarakat yang masih kurang dan mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu dalam berbagai hal. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Prinsip dasar daripada pemberdayaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri.

Salah satu faktor penting dalam mencapai mutu kehidupan didalam proses pemberdayaan dan pembangunan kapasitas masyarakat Menurut Yulianti (2013:4), yakni faktor teknologi. Teknologi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Adanya teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat dan berguna sehingga dapat mendukung masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan salah satunya adalah melalui penerapan Teknologi Tepat Guna. Bila dalam pengelolaan sumber daya yang melimpah di masyarakat tidak didukung oleh teknologi yang memadai maka usaha pengelolaan sumber daya menjadi kurang efisien, kurang optimal dan berkesinambungan, sehingga kontribusinya bagi pembangunan ekonomi masyarakat relatif kecil, Teknologi Tepat Guna diyakini sebagai pendekatan yang ampuh dalam upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat.

Teknologi tepat guna Menurut Tanaka (2012:09), merupakan teknologi yang sesuai dengan kondisi dimana teknologi tersebut digunakan atau diterapkan, baik

dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga masyarakat setempat mudah berpartisipasi dan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Teknologi tepat guna juga mengacu pada teknologi yang merupakan alternatif yang tidak dapat didaur ulang, dan ketergantungan manusia yang tidak terkontrol pada teknologi dari teknologi modern, yang mengakibatkan berbagai masalah, termasuk polusi, pemborosan sumber daya alam. Teknologi Tepat Guna (TTG) dapat difungsikan dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan potensi lokal. Oleh karena itu, Implementasi teknologi tepat guna mengisyaratkan perlunya keselarasan antara kebutuhan dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat dan aspek lingkungan hidup untuk itu dalam diseminasi teknologi tepat guna, isu teknologi hijau menjadi relevan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial dan budaya (Suwahyo dkk. 2000:12).

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara optimal oleh masyarakat akan mampu mewujudkan usaha masyarakat yang dapat mengefisienkan ongkos produksi, memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas, dan nilai tambah produk, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan dapat memberantas kemiskinan. Prasetyo dkk. (2012:10) menambahkan bahwa Pemanfaatan TTG secara optimal akan dapat terwujud bila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG kepada masyarakat pengguna sebagai salah satu upaya pemasyarakatan TTG mengingat faktor-faktor tertentu, seperti kesenjangan akses informasi, keterbatasan modal, dan kendala geografi, maka dalam proses alih teknologi khususnya Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat diperlukan campur tangan pemerintah untuk akselerasinya.

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap TTG, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang Operasionalisasi Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes), Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat di seluruh Indonesia untuk (1) melaksanakan operasionalisasi Posyantekdes; (2) memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkan dan memantapkan koordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan dinas/instansi terkait yang ada di daerah; (3) menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan (5) melaporkan hasil pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, menjelaskan bahwa “Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna” (Posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi TTG. Dengan demikian, pemanfaatan TTG secara optimal akan dapat terwujud bila terjadi alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih keterampilan (*transfer of skill*) dari sumber TTG kepada masyarakat luas selaku pengguna (*user*). Alih TTG dilaksanakan melalui upaya pemasyarakatan TTG, yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir rasional dalam mengeksplorasi sumber daya alam bagi usaha meningkatkan pendapatan. Melalui Posyantek, masyarakat sebagai perorangan

maupun kelompok usaha "*home industri*" mendapatkan manfaat positifnya karena dipandang membantu melayani dan mempertemukan antara penemu, pengembang, dan pemanfaat berbagai keperluan dan kebutuhan alat-alat Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan yang dibutuhkan serta mampu memberikan nilai tambah bagi kegiatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, Tujuan dari Penerapan teknologi tepat guna yakni :

1. Mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat memperluas lapangan kerja, lapangan usaha, meningkatkan produktivitas dan mutu produksi.
2. Menunjang pengembangan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab menuju keunggulan kompetitif dalam persaingan lokal, regional dan global.
3. Mendorong tumbuhnya inovasi di bidang teknologi.

Terbentuknya Posyantek merupakan komitmen dari Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui TTG sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara nasional dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, di Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mengimplementasikan Program Posyantek yang tertuang dalam Instruksi Gubernur

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). Selain itu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Teknologi Tepat Guna menjadi aspek penting eksistensi dari seluruh Posyantek yang ada di Provinsi DKI Jakarta dimana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta ditunjuk sebagai Dinas yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan jenis-jenis teknologi tepat guna untuk dapat mempercepat pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat.

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang diminati sebagai tujuan urbanisasi. Selain karena Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah Ibukota negara Indonesia, pertumbuhan jumlah penduduk DKI Jakarta pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2012-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pengangguran (%)
1	2012	9,862.100	10,6
2	2013	9,969.900	8,63
3	2014	10 075 310	8,47
4	2015	10 177 924	6,23

Sumber :Prov. DKI Jakarta dalam angka 2016: BPS DKI Jakarta 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui pertumbuhan jumlah penduduk DKI Jakarta terus bertambah dari tahun 2012 sampai 2015. Pertumbuhan jumlah penduduk perlu diseimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan agar tingkat

pengangguran tidak terus bertambah sehingga tingkat kemiskinan menurun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah angka kemiskinan dan angka pengangguran yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)
1	2012	366,77
2	2013	375,70
3	2014	412,79
4	2015	398,92

Sumber :Prov. DKI Jakarta dalam angka 2016: BPS DKI Jakarta 2016

Kebijakan publik juga menyangkut tiga aspek di dalamnya, perencanaan, implementasi serta evaluasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan prioritas terbesar yang seharusnya dilaksanakan dalam kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Winarno (2014) menyatakan implementasi kebijakan publik mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, peraturan atau pun regulasi di mana berbagai aktor, organisasi prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama dalam menjalankan suatu kebijakan sebagai upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Namun, dalam hal sudut pandang yang berbeda juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai

suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*) serta sebagai suatu dampak (*outcome*). Artinya, bahwa untuk melihat suatu perubahan dengan adanya suatu kebijakan maka kebijakan itu di implementasikan. Menurut Abdul Wahab (2012) implementasi kebijakan merupakan hal yang paling penting, namun implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan sendirinya seolah aktivitas atau proses implementasi atau pelaksana kebijakan merupakan hal yang paling penting daripada para pembuat kebijakan, kebijakan hanya akan menjadi arsip yang tertata rapi serta menjadi formalitas belaka apabila tidak diimplementasikan.

Maka dari itu penerapan posyantek di diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan diri sehingga dapat menggali potensi dan mengatasi tantangan yang ada. Namun didalam pelaksanaannya sejauh ini, sumberdaya manusia yang ditugaskan didalam Posyantek dianggap belum memiliki kemampuan yang cukup, kurangnya pembinaan dan monev (monitoring dan evaluasi) dari Provinsi dan Kabupaten/Kota masih lemah, pengurus jarang melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan pemahaman pengurus terhadap tugas dan fungsi yang tidak merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut harus adanya komitmen yang kuat dari lembaga tersebut dan adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Teknologi Tepat Guna. Kemudian perlunya bintek bagi pengurus dan Pembina Posyantek Provinsi dan Kabupaten/Kota. dalam pelaksanaannya, Posyantek memiliki berbagai kegiatan yang antara lain terkait dengan memberikan layanan teknis, informasi, dan promosi tentang berbagai jenis TTG kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis produk yang dihasilkan Usaha Kecil dan Menengah di Masyarakat (UKM) serta

menjadi jembatan masyarakat sebagai pengguna TTG dalam rangka pemanfaatan Teknologi yang disediakan.

Masyarakat Menurut Suwahyo dkk. (2000:21), hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan subjek langsung pembangunan di daerahnya. Akibatnya masyarakat tidak mengerti, tidak memiliki kemampuan atau kompetensi dalam memperbaiki dan memelihara keberlanjutan program pos pelayanan teknologi; bahkan tidak pernah terlibat untuk bertanggung jawab memelihara, menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumberdaya maupun potensi lokal yang dapat diberdayakan. Padahal substansi program Pos Pelayanan Teknologi adalah semata-mata untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dengan judul penelitian **“Implementasi Program Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) dalam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta (Studi Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat sebagai sasaran dan pemanfaat dari pos pelayanan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menarik rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta?

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong dari Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu meliputi :

1. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang administrasi, Implementasi kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai

sarana untuk melatih diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir ilmiah dan logis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintahan setempat sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pengimplementasian program Posyantek di tingkat nasional maupun di tingkat regional sehingga dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih produktif dan unggul.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam judul atau topik yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah berisi uraian singkat atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Atau untuk mengetahui garis besar yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini maka dapat dilihat dalam sistematika penulisan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat sehingga mudah dalam mempelajarinya. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang materinya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan dan menguraikan tentang konsep-konsep, teori-teori, atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan pokok masalah penelitian sehingga dapat mendukung dan menganalisa atau menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data dan Keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian di lapangan serta menyajikan data primer dan data sekunder yang telah terhimpun oleh peneliti pada saat terjun ke lapangan. Penyajian data yang disajikan beracu pada rumusan masalah sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penyajian data serta analisa berdasarkan kajian teoritik, empirik, dan normatif. Kesimpulan yang tertera pada bab ini merupakan akumulasi dari proses analisis berdasarkan fokus penelitian serta saran dan masukan yang bersifat konstruktif berdasarkan permasalahan empirik di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Freidrich dalam Winarno (2014:20) sebagai berikut :

“Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberi hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”

Sedangkan Anderson dalam Islamy (2014:17) menjelaskan kebijakan sebagai berikut:

“a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Dalam konteks pemerintahan, setiap kebijakan diarahkan sebagai pengaturan publik sehingga kebijakan sering diungkapkan sebagai kebijakan publik. Definisi kebijakan publik yang diungkapkan oleh Abidin (2012:10) adalah :

“Kebijakan publik pada hakekatnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang di inginkan.”

Dengan demikian kebijakan publik merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai kondisi yang diinginkan. Inilah mengapa kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk mengatur kebijakan dan keputusan dibawahnya.

Dunn (2014:132) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut :

“Kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.”

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn (2014:132) mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah dimana suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia (Dye dalam Tangkilisan, 2003:1).

Dye dalam Tangkilisan (2003:2) mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. lain halnya definisi yang diberikan oleh Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2010:3) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai

hasil-hasil tertentu. Disamping itu Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2010:4) menyebutkan sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern yakni sebagai label untuk sebuah bidang aktifitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktifitas negara yang di harapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otoritas formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori atau model dan juga sebagai proses.

Landau dalam Suharto (2010:24) menyatakan bahwa :

“Kebijakan publik sebagai bentuk lain dari analisis politik yang menggunakan metafora atau model sebagai perangkat untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal dan mungkin yang tidak diketahui secara politik *“Public policy, as other forms of political analysis, uses metaphors or models as devices to explore the unknown and possibly unknowable world of politic.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat atau dipilih untuk diambil oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah yang merupakan pedoman pegangan ataupun petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan dalam kenyataannya, kebijakan seringkali diartikan dengan peristilahan lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan publik sering dikaitkan dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa kebijakan dalam penelitian ini berkaitan dengan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri yang merupakan sebuah kebijakan yang

telah dibuat atau dipilih oleh pemerintah untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli yang mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Winarno (2014:35-37) membagi tahapan kebijakan sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda
 Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan
 Pada tahap ini, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan kemudian dicarikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah berasal dari dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil guna memecahkan masalah. Pada tahap ini pula masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan
 Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program akan hanya menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan/dijalankan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah kebijakan harus memulai dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Hingga nantinya dapat diketahui apa dan bagaimanakah sebuah kebijakan dihasilkan serta sejauh mana dampaknya berpengaruh kepada sasaran kebijakan. Pada penelitian ini nantinya akan difokuskan pada tahap implementasi kebijakan dan yang akan diimplementasikan adalah kebijakan pemerintah yakni kebijakan akan penerapan teknologi tepat guna.

B. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan berada dalam titik krusial didalam sebuah pengambilan kebijakan. Implementasi kebijakan berbicara proses panjang didalam sebuah kebijakan publik. Artinya adalah model implementasi dianggap sebagai

sebuah cara untuk melakukan progres kebijakan dari satu titik menuju titik lain sebelum mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Model-model implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Merile S. Grindle

Model ini berkembang pada tahun 1980. Berdasarkan model yang dibuat oleh tokoh di atas maka Wibawa (dalam Nugroho, 2009:550) menyatakan bahwasanya model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah, bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan, dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari suatu kebijakan.

Adapun isi dari kebijakan tersebut mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) Siapa pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga dan penguasa; (3) Kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan uraian di atas dapat dicermati bahwasanya model ini merupakan model yang memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap konteks kebijakan. Selain itu model ini juga bersifat *top down and market mechanism*. (Nugroho, 2009:510-511).

Berdasarkan definisi diatas, implementasi sebuah kebijakan melibatkan banyak aktor dan melibatkan banyak kepentingan didalamnya, serta melihat seberapa besar kepentingan-kepentingan yang masuk dapat membawa sebuah perubahan didalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya (SDM, pendanaan, sumber daya waktu) juga perlu diperhatikan didalam sebuah proses kebijakan. Kemudian selanjutnya dari serangkaian kegiatan mulai dari formulasi hingga implementasi program bertujuan untuk mendapatkan sebuah *output* yang positif guna mengubah derajat perubahan dari yang tidak diinginkan menuju suatu yang dikehendaki. Kesanggupan dan komitmen dari para aparat, juga berada pada posisi krusial jalan atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan.

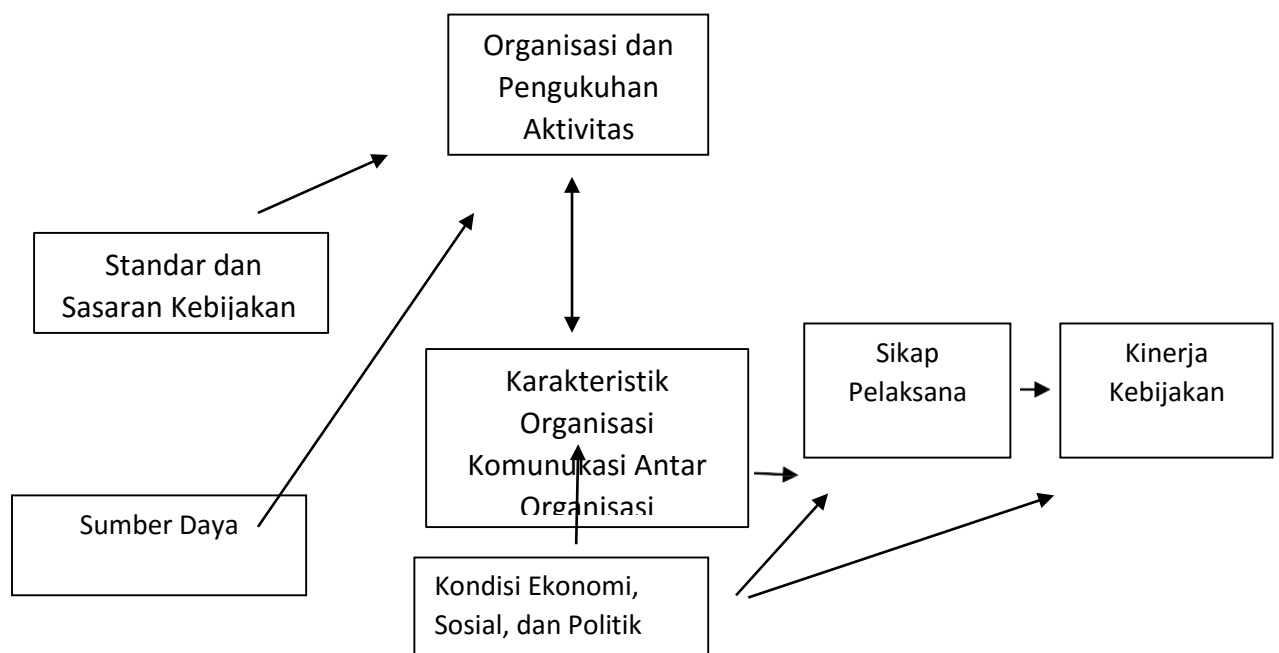
2. Implementasi Kebijakan Publik Model Hogwood dan Gunn

Model implementasi ini dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn pada Tahun 1978. Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana
- 2) Ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya waktu
- 3) Perpaduan antara sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
- 4) Kebijakan yang diimplementasikan didasari atas hubungan kausal yang andal
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi didalam proses pengimplementasian kebijakan.
- 6) Adanya hubungan saling ketergantungan yang kecil
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8) Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

3. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter dan Carl

Van Horn



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn

Sumber: Agustino, (2016:136)

Model ini adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn pada 1975. Model ini merupakan salah satu model kebijakan yang bersifat *top down*. Dalam model ini dijelaskan sekaligus mengandaikan bahwasanya kebijakan publik, implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

Model ini memiliki enam *variable* yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu :

1. **Standar dan sasaran kebijakan.** Kinerja implementasi kebijakan dapat

diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan (Agustino, 2016:133-134). Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. **Sumber Daya.** Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi (Agustino 2016:134). Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. **Organisasi dan Penguatan Aktivitas.** Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal. Hal ini sangat penting karena kineja implementas kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya (Agustino 2016:134-135). Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. **Karakteristik Organisasi Komunikasi Antar Organisasi,** Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2016:135). Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitupun sebaliknya.

5. **Sikap Pelaksana Implementasi Kebijakan.** Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik (Agustino, 2016:135). Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukan lah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
6. **Kinerja Kebijakan.** Outcome kebijakan biasanya berupa hasil, dampak, atau suatu konsekuensi dari suatu pelaksana kebijakan (Agustino, 2016:187). Dalam evaluasi kebijakan, outcomes bermanfaat untuk mengetahui apa yang ingin diupayakan atau diselesaikan oleh subjek atau pelaku kebijakan dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Berdasarkan definisi diatas, model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Carl Van Horn bersifat *top down*, melibatkan partisipasi masyarakat, serta tidak hanya melihat proses implementasi dari sisi internal organisasi. Model implementasi kebijakan tersebut mencakup beberapa variabel dilihat baik dari segi internal maupun external. Variabel yang dimaksud secara general dapat dimulai dari menjalankan rencana kegiatan, menentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, siapa yang terlibat dan bertanggung jawab, sumber daya, faktor sosial,

ekonomi politik, hingga menghasilkan derajat perubahan atau yang disebut *outcome* dari produk kebijakan yang dikerjakan,

4. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul

Sabatier

Model ini dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada Tahun 1983 yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel yakni :

1. Variabel Independen

Yaitu mudah-tidaknya masalah berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan.

2. Variabel Intervening

Yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap, dan *resources* konstituen.

3. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerima atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi

atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

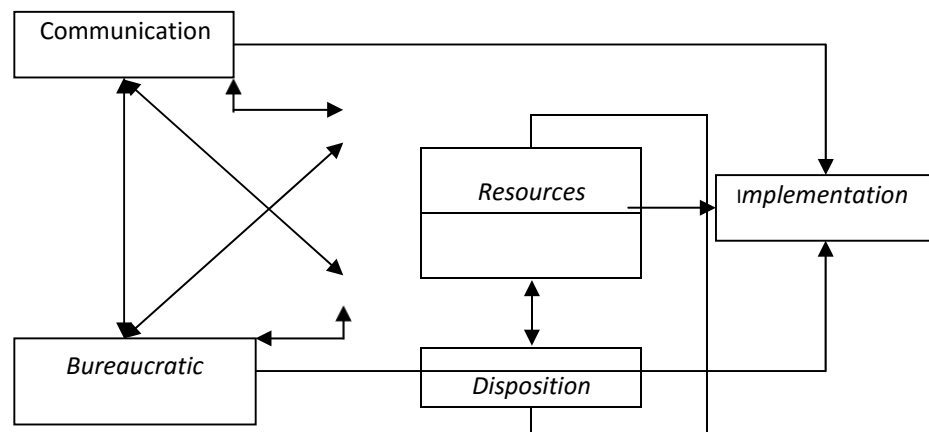


Feedback

Gambar 2. Implementasi kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Sumber: Wahab, (2015,178)

5. Implementasi Kebijakan Publik Model Goerge C. Edward III



Gambar 3. Implementasi Menurut George C. Edward III

Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

Kesatu *Communication* menurut Edward III adalah:

“The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personnel before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communication”
(Edward III, 1980:17)

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Faktor **Kedua** *Resources* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 1980:53)

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C. Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses keberhasilan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu. Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Faktor ***Ketiga Dispositions*** dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public implementation. If implmentation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise conssiderable discretion in the implementation of policies themselves. The way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policices effecting their organizational and personal intersts”. (Edward III 1980:89)

Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingi efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana). Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara sungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah diterapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

Faktor ***Keempat*** dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III *Bureaucratic structure* adalah:

“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. Two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. The former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”. (Edward III, 1980:125)

Menurut Goerge C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani. Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luar organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

Bureaucratic structure adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya *standard operating procedures (SOPs)* standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor *Bureaucratic structure* yang mendukung suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin di capai.

C. IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Pengertian Implementasi Program

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ketiga berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Wahab 1997: 67).

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan atau program. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pelaksanaannya di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Suharno (2008:187).

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan

dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti secara umum dan program dalam arti secara khusus. Pengertian program secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan sedangkan pengertian program secara khusus dapat diartikan bahwa program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan orang.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Rohman (2009: 101-102) menyebutkan “Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan” sedangkan Sedarmayanti (2003:12) menjelaskan bahwa program merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus.

2. Unsur-unsur dalam Implementasi Program

Proses implementasi dalam kenyataannya dapat berhasil jika ditinjau dari wujud hasil yang dicapai (*outcome*). Karena dalam proses tersebut terlibat berbagai unsur yang dapat bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian suatu program. Jadi untuk mengetahui keberhasilan program adalah dengan membandingkan antara hasil dengan pencapaian target program tersebut. Sedangkan Menurut Abdullah yang dikutip dalam Permatasari (2013:21) sekurang kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam proses pelaksanaan suatu program, yaitu:

- a. *Target groups* yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan menerima manfaat dari program tersebut.
- b. Unsur pelaksanaan atau Implementer, yaitu pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan hingga pengawasan implementasi tersebut.
- c. Faktor lingkungan, baik secara fisik, sosial budaya dan politik yang akan mempengaruhi proses implementasi program.

Lebih lanjut, Suatu program yang baik Menurut Tjokroamidjojo (1987:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut. dengan demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari setiap elemen yang ada didalamnya.

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang yang berperan didalamnya. Setiap program yang diimplementasikan atau dilaksanakan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Beberapa ahli mengungkapkan tujuan dari implementasi Program dengan berbeda-beda namun pada intinya tetap sama. Widodo (2009:16), menjelaskan bahwa tujuan Implementasi Program dalam bidang pendidikan secara umum bertujuan (1) untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam waktu yang telah ditentukan. (2) untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah efektifitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik.

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada pasal

2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Haris dalam Nurcholis (2007:100), menjelaskan bahwa pemerintahan daerah (local self government) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supermasi pemerintahan nasional.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mengatur pemerintahan daerah pada Bab VI Pasal 18 ayat 5 menyebutkan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 6 menyatakan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pemerintah daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bab I pasal 3, pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat berupa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Berdasarkan definisi diatas, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan

tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemerintah daerah, pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Adam Smith dalam Muluk (2009:111) pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti.

Oleh karena itu, dengan diberikannya kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, pemerintah daerah harusnya mengerti peran-peran yang perlu dijalankan. Salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

E. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari dalam suatu negara. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan berperan penting dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik dari pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti beberapa pengertian yang dijelaskan oleh undang-undang atau aturan hukum maupun dari para ahli.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selain itu menurut Mahmudi (2010:223) pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Kurniawan dalam Pasolong (2008:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Beberapa pengertian mengenai pelayanan publik yang dijelaskan oleh undang-undang atau aturan hukum maupun para ahli mengandung makna yang sama. Bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah melalui posyantek (pos pelayanan teknologi) memberikan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teknologi. Posyantek (pos pelayanan teknologi) memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna. Tugas dari posyantek adalah memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi teknologi tepat guna, memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna, menjembatani masyarakat sebagai pengguna teknologi tepat guna dengan sumber teknologi tepat guna, memotivasi penerapan teknologi tepat guna di masyarakat, memberikan layanan konsultasi dan

pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna, dan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna.

F. Teknologi

1. Teknologi

Teknologi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Hampir setiap saat manusia memakai teknologi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya kecilnya saja untuk mengirim pesan. Maka dari itu, teknologi merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Besari (2008:148) mendefinisikan teknologi adalah

“Ilmu pengetahuan dan seni yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa dan struktur terorganisasi yang pada dasarnya merupakan seperangkat instrumen ekspansi kekuasaan manusia sehingga dapat menjadi sumber daya cara baru untuk menciptakan kekayaan melalui peningkatan produktivitas.”

Selain itu, menurut D. Bell dalam Besari (2008:147) menyatakan bahwa teknologi pada dasarnya adalah instrumen untuk memperbesar (expand) kekuasaan manusia (human powers) dalam menciptakan kekayaan (wealth).

Teknologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang diciptakan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Perubahan teknologi tradisional menjadi teknologi modern di negara maju sangatlah berpengaruh dengan pemakaian teknologi di negara-negara berkembang. Namun pengembangan dari teknologi modern di negara maju dan negara berkembang sangatlah berbeda, dikarenakan teknologi modern yang dikembangkan negara maju tidak menjadi tepat guna terhadap faktor-faktor yang terkandung dengan negara berkembang.

Teknologi modern mengakibatkan berbagai masalah seperti ketimpangan, polusi, pemakaian sumber daya alam secara berlebihan, dan ketergantungan

manusia dalam pemakaian teknologi. Jika di negara maju sudah siap dalam mengatasi dampak dari penggunaan teknologi modern, tetapi tidak dengan negara berkembang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perubahan salah satunya dengan menciptakan teknologi baru yaitu teknologi tepat guna.

2. Konsep Teknologi Tepat Guna (TTG)

Transfer teknologi yang dilakukan oleh negara maju ke negara berkembang pada mulanya membawa harapan. Namun dengan adanya transfer teknologi tersebut, muncul beberapa permasalahan baik dari segi lingkungan dan sosial-budaya. Sehingga dibutuhkan suatu inovasi dalam penerapan teknologi di suatu negara, karena penerapan teknologi pada satu negara dengan negara lainnya belum tentu sama. Hal ini memunculkan pengelolaan teknologi yang lebih baik, sehingga diciptakanlah teknologi tepat guna.

Menurut Tanaka (2005:ix-x) teknologi tepat guna memiliki definisi ganda, secara umum teknologi tepat guna dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Teknologi yang sesuai dengan kondisi dimana teknologi tepat tersebut digunakan atau diterapkan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga masyarakat setempat mudah berpartisipasi dan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Konsep teknologi tepat guna dilatarbelakangi oleh proyek bantuan internasional atau bilateral yang sebelumnya sering gagal karena teknologi yang dikembangkan di negara maju langsung dialihkan ke negara berkembang yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat berbeda. Teknologi tepat guna yang memiliki makna ganda adalah jenis teknologi yang bisa dikontrol oleh masyarakat dan mereka pun bisa berpartisipasi di dalamnya dengan mudah, bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat di negara berkembang, ramah lingkungan, dan tidak memboroskan sumber daya alam.”

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, menjelaskan bahwa:

“Teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.”

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, pemerintah mempunyai keseriusan dalam penerapan teknologi tepat guna sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat. Karena teknologi tepat guna diciptakan pada perencanaan yang sesuai dengan kondisi-kondisi khusus seperti sumber daya, ekonomi maupun sosial-budaya dari suatu daerah. Salah kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri adalah Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) yaitu berupa penerapan teknologi tepat guna, yang diterapkan hampir diseluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Posyantek mengutamakan pemakaian teknologi tepat guna dalam hal mengelola suatu inovasi sumber daya yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam aspek ekonomi dan lingkungan, dan memberikan pelayanan secara teknis, informasi dan promosi jenis teknologi tepat guna kepada masyarakat. Oleh karena itu penerapan posyantek diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan melakukan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

G. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*. di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, baru setelah konferensi Beijing 1995 pemerintah

menggunakan istilah yang sama. perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana (*discourse*) publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci (*keyword*) bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. (Mardikanto 2010: 35).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan atau bakat. Bertolak dengan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani.2004:77)

Pemberdayaan Masyarakat menurut Sumodiningrat (2002:12) mengandung tiga pengertian, yaitu:

“pertama, pemihakkan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan. Kedua, mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan level (*level playing field*) dan yang ketiga melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang mempunyai prioritas diberdayakan.”

Pemberdayaan menurut Hogan dalam Adi (2008:86) mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat yang tidak berdaya agar terlepas dari belenggu ketergantungan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memandirikan masyarakat melalui kegiatan pelatihan. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pemberdayaan terkait dengan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik, mengubah ketidakberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya.”

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang sudah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dan upaya yang dapat mengubah lapisan masyarakat atau

memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat yang lemah agar dapat memiliki kemampuan dan keterampilan yang nantinya akan dapat digunakan untuk membangkitkan potensi yang ada pada dirinya agar menjadi lebih mandiri dalam

Anwas (2013:58-60) mengidentifikasi beberapa prinsip

pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan;
- b. Kegiatan pemberdayaan di dasarkan pada kebutuham, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potens dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi kepada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran. Biasanya pada masyarakat pedesaan yang masih tertutup, aspek kebutuhan, masalah, dan potensi tidak nampak. Agen pemberdayaan perlu memiliki potensi untuk memahami potensi dan kebutuhan klien/sasaran;
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan dan bentuk aktivitas pemberdayaan;
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan;
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini dilakukan secara logis dari sifatnya sederhana menuju kompleks;
- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama;
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat;

- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan;
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (lifelong learning/education). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan berbagai sumber yang tersedia. Sumber belajar tersebut bisa: pesan, orang (termasuk masyarakat di sekitarnya), bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan di sekitar tempat mereka tinggal. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja (learning by doing);
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan;
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan;
- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut, mulai dari: mau berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan networking sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi;
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator; dan
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya. Berbagai aspek dan terus dikembangkan secara maksimal.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat (Anwas, 2013:87). Banyak bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh agen pemberdayaan, bentuk pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta melihat keinginan atau partisipasi dari masyarakat. Bentuk aktivitas pemberdayaan

diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya (Anwas, 2013:86).

Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan baik harus mempunyai strategi untuk mencapai keberhasilan dalam pemberdayaan tersebut. Sedangkan menurut Ismawan dan Priyono (1996) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebianto (2012:170), menetapkan ilmu program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat
- d. Pengembangan usia produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna

Keanekaragaman masyarakat akan mempengaruhi dalam pemilihan keputusan dan keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Dalam hal ini Dubois dan Miley dalam Anwas (2013:88-89) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan, yaitu:

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam membentuk respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien (client partnerships);
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk: menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga keharasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran;

- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien/ sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya; dan
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan- kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan yaitu sebagai berikut

Theresia, dkk (2014 : 153-154):

a. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas

e. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)

Teknologi tepat guna dapat didefinisikan sebagai teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya sehingga masyarakat mudah menerapkan di lingkungannya. Menurut Mahlinda (2012:15) menggunakan teknologi tepat guna mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya: lebih murah, dapat dibuat secara lokal, ramah lingkungan, dan keikutsertaan masyarakat yang tinggi. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sehingga penerapan teknologi tepat guna merupakan salah satu alternatif cara pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Anwas, 2013:3).

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Meningkatkan usaha ekonomi;
2. Mengembangkan kewirausahaan;
3. Memberikan manfaat berkelanjutan; dan
4. Sederhana.

Sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu atau kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan atau penggunaan teknologi tepat guna;
2. Menumbuh kembangkan kemampuan akan inovasi masyarakat (IPTEK) dalam pembangunan daerah;
3. Menciptakan kesempatan kerja baru; dan
4. Menjalankan dan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan atau pemanfaatan teknologi tepat guna.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menerapkan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakatnya, dikarenakan dengan penerapan teknologi tepat guna akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas nilai tambah mutu hasil produksi kegiatan masyarakat. Penerapan dari adanya teknologi tepat guna melalui terobosan Pos Pelayanan Teknologi di Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan agar dapat selaras dengan tujuan teknologi tepat guna yakni menerapkan konsep-konsep manajemen modern ke dalam praktek (dunia nyata dan perilaku masyarakat) dalam upaya optimalisasi hasil produksi atau pendapatan masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi Penelitian Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2008:13), adalah cara ilmiah untuk memperoleh data atau informasi dengan tujuan dan manfaat tertentu. Suatu penelitian agar mampu mencapai tujuan yang tepat dan akurat suatu penelitian maka diperlukan suatu metode yang berisi cara-cara yang digunakan secara sistematis dengan prosedur yang harus dilalui agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif Menurut Arikunto (2010:234) adalah suatu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dimana penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2008:6).

Definisi pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2008:4) dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan jenis penelitian ini lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi dasar pemikiran penulis sejalan dengan pendapat Moleong (2008:22) bahwa menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai suatu kejadian di lapangan sesuai dengan apa adanya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan data yang akan diamati, dikumpulkan, diolah, dan di analisa oleh peneliti dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Perlunya fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Menurut Moleong (2008:93) fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antar dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Hubungan antar Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila keduanya ditempatkan secara berpasangan akan menimbulkan sejumlah tanda tanya atau kesulitan (Moleong, 2008:93). dalam penelitian ini, fokus

penelitian yang ditetapkan oleh peneliti menggunakan Implementasi model Edward sebagai objek yang akan diteliti dimana fokus penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Provinsi DKI Jakarta :
 - a. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
 - b. Tujuan Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Sasaran Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat didalam Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan keberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas fokus penelitian, selain dikarenakan Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melakukan aktifitas urbanisasi, dan ini berimbas terhadap jumlah

penduduk yang terus meningkat di setiap tahunnya. Pertambahan penduduk disetiap tahunnya memiliki dampak terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan yang terus meningkat, kesenjangan sosial dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang ikut mengimplementasikan program posyantek sebagai salah satu cara pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Situs penelitian ditetapkan guna untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta karena dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) di DKI Jakarta salah satunya yakni memperkenalkan jenis-jenis teknologi tepat guna bagi masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Menurut Lofland yang dikutip Moleong (2008:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Hal

ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara (*interview*) dan pengamatan langsung (*observasi*) di lapangan dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Menurut Arikunto (2010:22) data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh Data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait dengan permasalahan tanpa melalui perantara. Narasumber dari penelitian ini direncanakan akan melibatkan :

- a) Erma Suryani Rumondang (46th) Kepala Sub Bidang TTG dan Jaringan Informasi DPPAPP
- b) Saiful (47th) Staff Subid Bidang TTG dan Jaringan Informasi DPPAPP
- c) Tyas (28th) Staf Subbid Bidang TTG dan Jaringan Informasi DPPAPP
- d) Rani (40th) Ketua Posyantek Kembangan Jakarta Barat
- e) Akil (45) Ketua Posyantek Jagakarsa Jakarta Selatan
- f) With (60) Ketua RW Taman Aries Jakarta Barat

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mencakup informasi yang dikumpulkan dan relevan terhadap masalah yang akan diteliti. Data sekunder adalah data tertulis yang berasal dari sumbernya dan diperoleh dari dokumen-

dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen, laporan-laporan, atau informasi tertulis hasil studi pustaka yang bersumber pada literatur, surat kabar, internet serta media lainnya yang dapat menunjang dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Arikunto (2010:129) bahwa dalam rangka mempermudah dan mengklarifikasikan data, sumber data sekunder yang digunakan yaitu :

- a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- b) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Operasional Pos Pelayanan Teknologi.
- c) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- d) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.
- f) Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2013-2017.
- g) Dokumen Posyantek Kembangan Jakarta Barat.
- h) Dokumen Posyantek Jagakarsa Jakarta Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Nasution, dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Esterberg, dalam Sugiyono (2012:231) mendefinisikan *Interview* sebagai berikut:” *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara direncanakan akan melibatkan:

- a) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, untuk mendapatkan informasi dan data peneliti harus melewati Peraturan dari Provinsi DKI Jakarta lewat jalur (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan izin

untuk mencari informasi atau data ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

- b) Pengurus Pos Pelayanan Teknologi, lewat data dan informasi dari Subbid TTG dan Informasi Jaringan DPPAPP Peneliti dapat mengetahui Posyantek yang berpotensi untuk diteliti. Untuk Posyantek yang diteliti sangat terbuka sekali memberikan informasi dan data terhadap peneliti.
- c) Masyarakat sebagai pemanfaat program, dari pihak posyantek langsung memberikan sumber daya masyarakat agar untuk bisa diwawancara oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti agar hasil wawancara dan observasi lebih kredibel atau dapat dipercaya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian Menurut Sugiyono (2012:63), merupakan komponen penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam rangka pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam penelitian kualitatif dikatakan sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:65) Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data tergantung dari diri peneliti sendiri dengan segenap aktivitasnya dalam menyerap dan mengambil data dilapangan. Peneliti sebagai instrument utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan melalui observasi dan melakukan wawancara.

2. Alat bantu penelitian mencakup buku catatan penelitian dan kamera perekam sebagai bukti keabsahan data penelitian.
3. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
4. Catatan lapangan (*fieldnotes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
5. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan atau pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
6. Alat tulis – menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penghimpunan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk sederhana. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah dimengerti dan maknanya dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:244) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, disusun ke dalam suatu pola, memilah data yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Adapun alur aktivitas analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33) sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

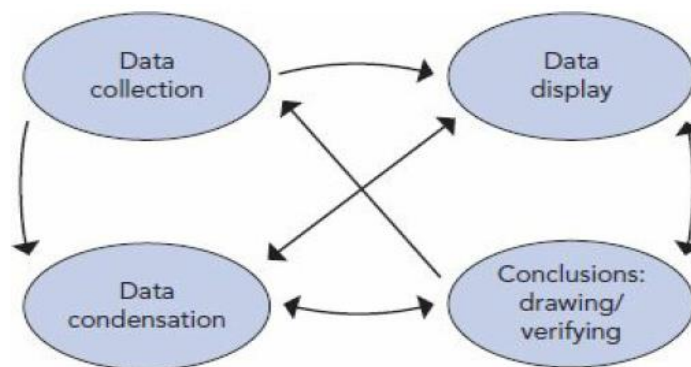
Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang di dapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian. Kondensasi dapat dilakukan dengan cara, menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk table maupun bentuk kalimat atau uraian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya.



Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

BAB IV

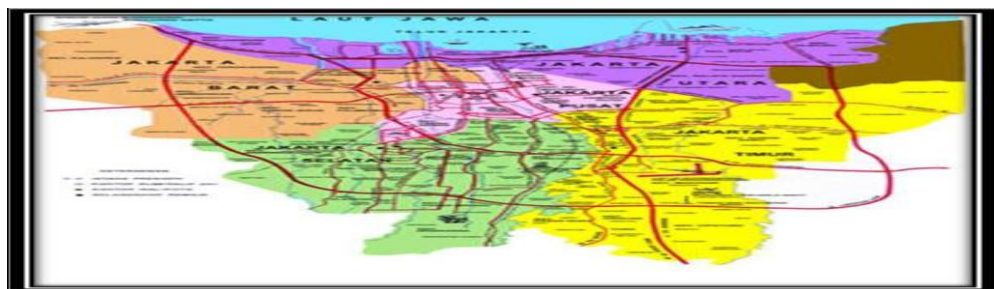
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi DKI Jakarta terdiri atas di 5 wilayah kota Administratif dan 1 Wilayah Kabupaten Administratif yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Gambar 5. Peta Administratif Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Jakarta Dalam Angka 2016

Berdasarkan gambar diatas, wilayah adminitratif Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi, yakni: Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Tabel 3. Luas Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Area (km ²)	Jumlah Penduduk	Proporsi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kepulauan Seribu	8,70	23.340	0,23	2.683,96
Jakarta Selatan	141,27	2.185.711	21,48	15.472,17
Jakarta Timur	188,03	2.843.816	27,93	15.124,15
Jakarta Pusat	48,13	914.182	8,98	18.993,11
Jakarta Barat	129,54	2.463.560	24,20	19.017,92
Jakarta Utara	146,66	1.747.315	17,17	11.913,83
DKI Jakarta	662,33	10.177.924	100	15.366,87

Sumber: Jakarta Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, persebaran penduduk di DKI Jakarta dapat dikatakan belum seimbang dengan luas wilayah masing-masing kota/kabupaten administrasi. Pada tahun 2015, jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 10.177.924 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di wilayah Jakarta Timur dengan jumlah penduduk mencapai 2.8.43.816 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu yang hanya mencapai 23.340 yang tersebar di beberapa pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.

a. Kondisi Geografis

DKI Jakarta terletak pada posisi $6^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}48'$ Bujur Timur. Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah waduk/situ yang relatif banyak dengan total luas sebesar 221,8 Ha. Sungai atau kanal yang melewati Kota Jakarta sebanyak 19 sungai. Luas daratan wilayah DKI Jakarta sebesar $662,33 \text{ km}^2$, sedangkan luas per wilayah administratif Kota Jakarta yaitu Jakarta Barat $129,54 \text{ km}^2$, Jakarta Selatan $141,27 \text{ km}^2$, Jakarta Utara $146,66 \text{ km}^2$, Jakarta Timur $188,03 \text{ km}^2$, Jakarta Pusat $48,13 \text{ km}^2$, dan Kabupaten Kepulauan Seribu $8,70 \text{ km}^2$.

a. Kondisi Demografis

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 10.177.924 yang terdiri dari 5.115.357 laki-laki dan 5.062.567 perempuan.

2) Komposisi

Mayoritas penduduk Kota Jakarta adalah suku Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Madura, Banten, Banjar, dan berbagai perantau di luar suku Jawa lainnya yang tinggal dan menetap di kota ini.

c. Agama

Mayoritas penduduk Kota Jakarta beragama Islam, diikuti oleh Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Kerukunan antar umat beragama di Jakarta terjalin dengan toleransi cukup tinggi.

d. Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih langsung oleh warga DKI Jakarta dalam pemilihan Gubernur setiap lima tahun sekali. Gubernur DKI Jakarta membawahi koordinasi wilayah administrasi kota/kabupaten yang dipimpin oleh seorang walikota/bupati pada masing-masing wilayah administrasi kota/kabupaten. Berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Hal ini lah yang membedakan DKI Jakarta dengan daerah lain sebagai daerah otonomi khusus yang dimana walikota/bupati tidak dipilih berdasarkan pemilihan umum. Gubernur DKI Jakarta pada saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

e. Visi dan Misi DKI Jakarta

1) Visi

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan berorientasi pada pelayanan publik.

f. Lambang Provinsi DKI Jakarta

Gambar 6. Lambang Kota Jakarta



Penjelasan Lambang Kota Jakarta:

- a. Pintu Gerbang, adalah lambang Kekhususan Jakarta sebagai pintu keluar masuk kegiatan-kegiatan nasional dan hubungan internasional.
- b. Tugu Nasional, adalah lambang Kemegahan, Daya Juang dan Cipta.
- c. Padi dan Kapas, adalah lambang Kemakmuran.
- d. Ombak Laut, adalah lambang Kota, Negeri Kepulauan.
- e. Sloka "Jaya Raya", adalah Slogan Perjuangan Jakarta.
- f. Perisai Segilima, adalah melambangkan Pancasila.
- g. Warna Emas pada pinggir Perisai, adalah lambang Kemuliaan Pancasila.

- h. Warna Merah pada Sloka, adalah lambang Kepahlawanan.
- i. Warna Putih pada Pintu Gerbang, adalah lambang Kesucian.
- j. Warna Kuning pada Padi, Hijau, Putih dan Kapas, adalah lambang Kemakmuran dan Keadilan.
- k. Warna Biru, adalah lambang angkasa bebas dan luas.
- l. Warna Putih, adalah lambang alam laut yang kasih.

2. Gambaran Umum Badan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta berada di Jalan Ahmad Yani Kav. 64 By Pass, Cempaka Putih. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil penggabungan dari dua SKPD, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BPKKBD). Mempunyai filosofi “Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana”. Dan juga memiliki grand strategi “Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB Menata Kembali Pengelolaan Program KB, Memperkuat SDM Operasional Program KB, Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB, Meningkatkan Pembiayaan Program KB”.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

a. Visi dan Misi

Sebagaimana organisasi lainnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta memiliki visi dan misi yang menjadi panduan pelaksanaan tugas. Sedangkan misi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan *good governance* di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana;
- 2) Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
- 3) Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan peduli melalui perubahan sikap dan perilaku;
- 4) Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan, pemasyarakatan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- 5) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

b. Dasar Hukum

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta memiliki dan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga berencana di daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tugas pokok, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai beberapa fungsi untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana;
- 2) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana;
- 4) Penyuluhan, sosialisasi dan internalisasi norma keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 5) Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi permasalahan dan potensi pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana;

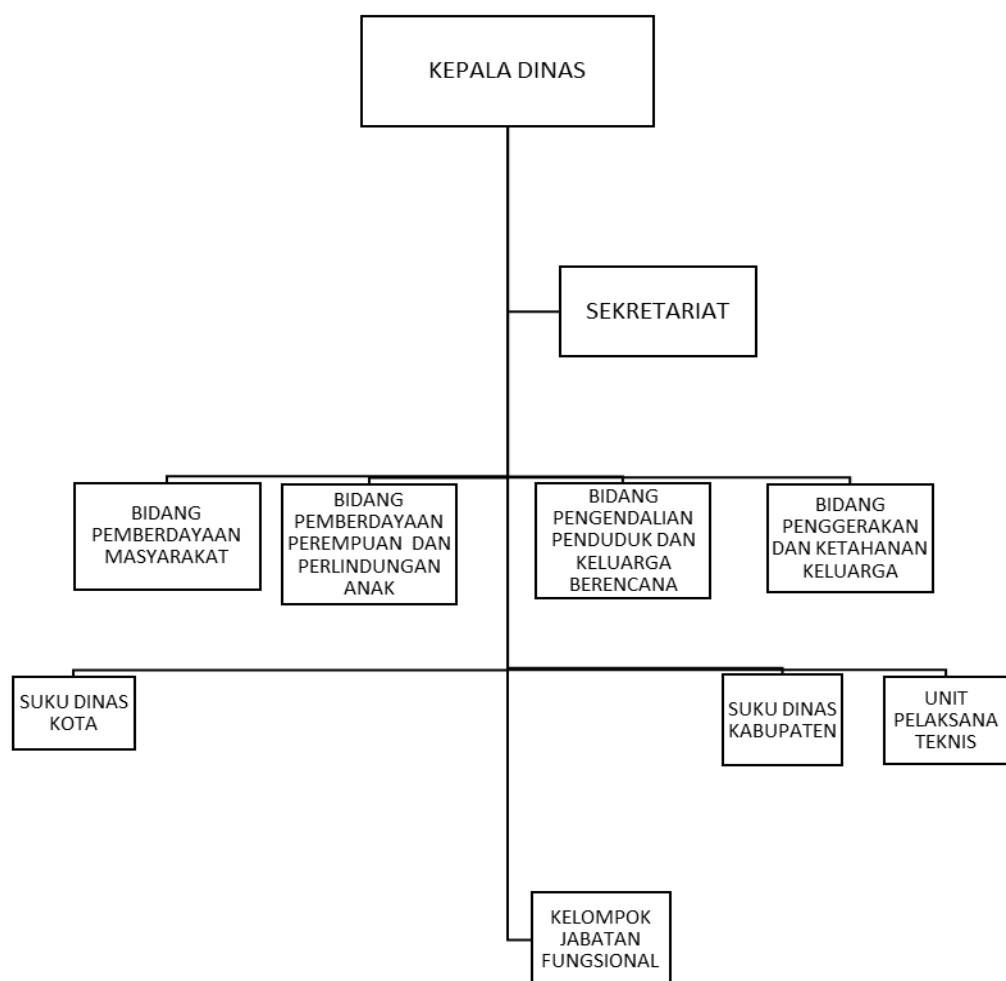
- 6) Penyelenggaraan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- 7) Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
- 8) Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.

d. Kewenangan

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- 4) Penetapan sistem informasi dibidangnya; dan
- 5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tentu dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - b) Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

e. Susunan Organisasi

BADAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.



Gambar 7. Struktur Organisasi DPPAPP DKI Jakarta

Sumber : Dinas Pemberdayaan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk 2017

1) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas:

- a) Memkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kantor Kota/ Kabupaten Administrasi;
- b) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan atau instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP dan KB; dan
- c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPMP dan KB.

Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang dan Kantor Kota atau Kabupaten Administrasi, UPT dan Sub Kelompok Fungsional yaitu :

- 1) Sekretariat, yaitu terdiri dari:
 - a) Suku Bidang Umum;
 - b) Suku Bidang Kepegawaian;
 - c) Suku Bidang Program dan Anggaran;
 - d) Suku Bidang Keuangan.
- 2) Kepala Bina Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sikap perilaku dan kelembagaan masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat.
 - a) Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan Sikap Perilaku Masyarakat;
 - b) Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 - c) Kepala Sub. Bidang Partisipasi Masyarakat;

- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas melaksanakan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi tiga kepala sub. bidang, yaitu:
 - a) Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan Peranan Perempuan;
 - b) Kepala Sub. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c) Kepala Sub. Bidang Kelembagaan Perempuan dan Anak.
- 4) Bidang Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta melakukan pendataan sasaran program, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna membawahi kepala sub. bidang, yaitu:
 - a) Kepala Sub. Bidang Pengembangan;
 - b) Kepala Sub. Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan;
 - c) Kepala Sub. Bidang Identifikasi, Analisis dan Penyajian Data.
- 5) Kepala Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas melaksanakan peningkatan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dan perlindungan hak-hak reproduksi serta penanggulan masalah kesehatan reproduksi. Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi membawahi tiga kepala sub. bidang, yaitu:
 - a) Kepala Sub. Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

- b) Kepala Sub. Bidang Peningkatan Partisipasi Pria;
 - c) Kepala Sub. Bidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi.
- 6) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas melaksanakan advokasi dan edukasi, pendampingan keluarga serta peningkatan kesejahteraan akseptor. Kepala Bidang Keluarga membawahi tiga kepala sub. bidang, yaitu:
- a) Kepala Sub. Bidang Advokasi dan Edukasi;
 - b) Kepala Sub. Bidang Pedampingan Keluarga;
 - c) Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Akseptor.
- 7) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak serta pengelolaan teknologi tepat guna pada lingkup wilayah kota administrasi. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi membawahi satu Sub. bidang Tata Usaha, tiga Kepala Sub. Bidang dan Sub. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
- a) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
 - b) Kepala Sub. Bidang Pedampingan Keluar Bina Kemasyarakatan;
 - c) Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d) Kepala Sub. Bidang Teknologi Tepat Guna;
 - e) Sub. Kelompok Jabatan Fungsional (belum ada)

- 8) Kepala Kantor KB Kota Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan dan pelayanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program KB pada lingkungan wilayah Kota Administrasi. Kepala Kantor KB Kota Administrasi membawahi satu Sub. Bagian Tata Usaha, tiga Kepala Sub. Bidang dan Sub. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
- a) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
 - b) Kepala Sub. Bidang Kesehatan Reproduksi;
 - c) Kepala Sub. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - d) Kepala Sub. Bidang Peran Serta Masyarakat;
 - e) Sub. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 9) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak serta pembinaan dan pengembangan keluarga berencana pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi. Kepala Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi membawahi satu Sub. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
- a) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
 - b) Kepala Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - c) Kepala Sub. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - d) Sub. Kelompok Jabatan Fungsional.

10) Kepala UPT Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kestaraan Gender, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kestaraan Gender. Kepala UPT Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kestaraan Gender membawahi satu Sub. Bagian Tata Usaha, dua Kepala Sub. Bidang dan Sub. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

- a) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
- b) Kepala Seksi Pelatihan;
- c) Kepala Seksi Pengembangan;
- d) Sub. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi)

Pos Pelayanan Teknologi selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi berbagai jenis teknologi tepat guna. Dalam pelaksanaan pembinaan posyantek dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:

1) Pusat

Pembinaan posyantek secara nasional menjadi tanggungjawab Menteri Dalam Negeri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan mengadakan koordinasi dengan institusi terkait.

2) Provinsi

Pembinaan skala provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Provinsi. Untuk Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan.

3) Kabupaten atau Kota

Pembinaan skala kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab bupati atau walikota, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Pembangunan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau Kota. Dalam tingkat ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibantu oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan yang ada di masing-masing kota administrasi.

4) Kecamatan

Pembinaan di kecamatan menjadi tanggung jawab camat sesuai dengan pelimpahan yang di berikan oleh Bupati atau Walikota. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat atau sebutan lain.

5) Kelurahan

Pembinaan di kelurahan menjadi tanggung jawab lurah sesuai dengan warung teknologi yang diberikan kecamatan. Pelaksanaan masyarakat pembinaan dilakukan oleh Ketua Posyantek.

Masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pembinaan pada masing-masing tingkat pemerintahan sebagai berikut:

1) Pusat

Pembinaan dilakukan secara nasional melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan posyantek;
- b) Pemberian pedoman pengelolaan posyantek;
- c) Supervisi pengelolaan posyantek;
- d) Monitoring dan evaluasi pengelolaan posyantek;
- e) Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan posyantek; dan
- f) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan posyantek.

2) Provinsi

Pembinaan dilaksanakan dalam skala provinsi melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan posyantek;
- b) Pemberian pedoman teknis pengelolaan posyantek;
- c) Supervisi pengelolaan posyantek;
- d) Monitoring dan evaluasi pengelolaan posyantek;
- e) Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan posyantek; dan
- f) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan posyantek.

3) Kabupaten atau Kota

Pembinaan dilaksanakan dalam skala kabupaten atau kota melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan posyantek;
- b) Supervisi pengelolaan posyantek;
- c) Monitoring dan evaluasi pengelolaan posyantek;

- d) Pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan posyantek; dan
- e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan posyantek.

4) Kecamatan

Bupati atau walikota dapat melimpahkan pembinaan kepada camat, dengan kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan posyantek;
 - b) Supervisi pengelolaan posyantek; dan
 - c) Monitoring dan evaluasi posyantek.
- 1) Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi teknologi tepat guna.
 - 2) Membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna;
 - 3) Menjembatani masyarakat sebagai pengguna teknologi tepat guna dengan sumber teknologi tepat guna;
 - 4) Memotivasi penerapan teknologi tepat guna di masyarakat;
 - 5) Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna.

Menjalin kerja sama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. Mengacu pada tugas posyantek, maka kegiatan yang dapat dilakukan posyantek, sebagai berikut:

1) Inventarisasi Teknologi Tepat Guna

Kegiatan ini bertujuan agar posyantek memiliki data dan informasi teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang diinventarisasikan adalah teknologi yang ada di lingkup kecamatan maupun diluar kecamatan yang meliputi bidang pertanian, industri, kesehatan, sipil bangunan.

2) Pelayanan Informasi Teknologi Tepat Guna

Pelayanan informasi teknologi tepat guna dilakukan melalui penyuluhan, pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang data ke posyantek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui radio dan sejenisnya. Juga dapat disediakan informasi pasar teknologi tepat guna meliputi harga, dan hasil produk teknologi tepat guna yang diproduksi masyarakat. Layanan ini dapat dibuka setiap hari atau dijadwalkan secara teratur.

3) Kursus atau Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi tepat guna.

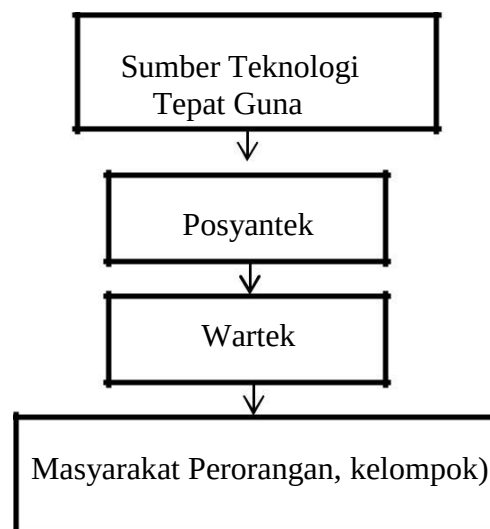
4) Peragaan Teknologi Tepat Guna

Keputusan untuk menggunakan suatu jenis teknologi tepat guna perlu adanya bukti dan atau fakta empirik. Oleh karena itu, dalam rangka mensosialisasikan suatu jenis teknologi tepat guna kepada masyarakat diperlukan peragaan teknologi tepat guna. Peragaan teknologi tepat guna dapat dilakukan melalui:

- a) Pameran teknologi tepat guna di tingkat kecamatan pada kesempatan tertentu, seperti pada peringatan 17 Agustus, kebangkitan nasional dan sejenisnya; dan
- b) Demonstrasi penggunaan teknologi tepat guna di beberapa desa atau kelurahan.

5) Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Kegiatan ini dilakukan melalui kajian dan ujicoba teknologi tepat guna, yang dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya. Dalam rangka mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, posyantek dapat menyelenggarakan lomba cipta teknologi tepat guna.



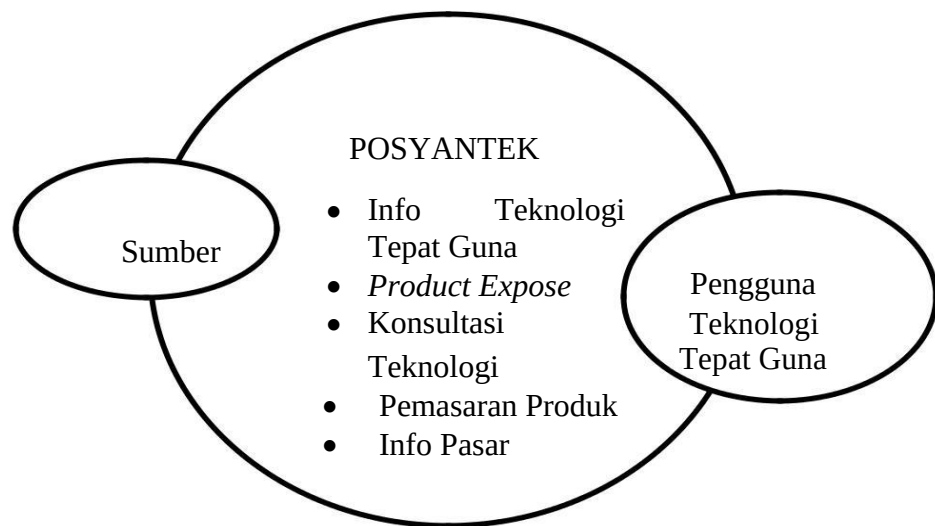
Gambar 8. Bagan Alur Transfer Teknologi Tepat Guna

Sumber : Panduan Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tahun 2016

Sumber teknologi tepat guna adalah pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaga yang menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis teknologi tepat guna yang diperlukan masyarakat pengguna teknologi tepat guna. Setelah mengetahui sumber teknologi tepat guna, melalui posyantek dan wartek menjembatani untuk memberikan pendampingan dan layanan dalam penerapan teknologi tepat guna ke masyarakat. Pembinaan

pemberdayaan masyarakat melalui posyantek dilakukan secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan, meliputi:

- 1) Koordinasi;
- 2) Pemberian pedoman dan standar;
- 3) Penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis;
- 4) Supervisi dan konsultasi; dan
- 5) Pemantauan dan evaluasi.



Gambar 9. Tujuan Teknologi Tepat Guna

Sumber : Panduan Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tahun 2010

Setiap posyantek yang ada di kecamatan memiliki wartek (warung teknologi), wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa atau kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna. Adanya wartek adalah untuk membantu posyantek dalam memberikan pembinaan, pelayanan, informasi dan mempromosikan jenis-jenis teknologi tepat guna, wartek berada di setiap kelurahan-kelurahan yang ada dalam 1 (satu) kecamatan. Jumlah

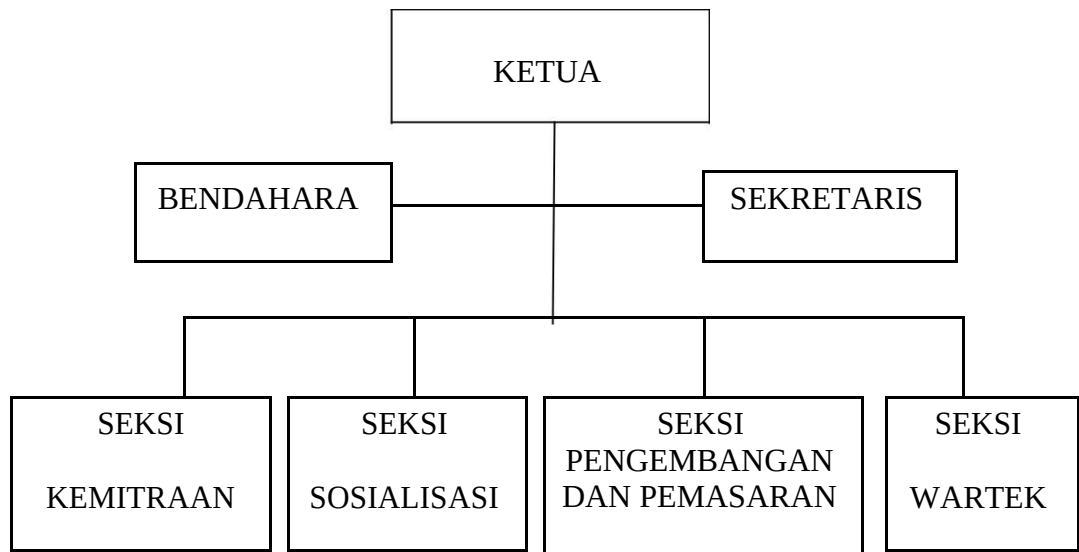
wartek dalam 1 (satu) kecamatan dengan kecamatan lainnya berbeda, dikarenakan jumlah wartek menyesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada dalam 1 (satu) kecamatan. Wartek (warung teknologi) mempunyai tugas:

- 1) Memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 2) Memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi kepada masyarakat dan usaha kecil;
- 3) Mempromosikan jenis-jenis teknologi tepat guna kepada masyarakat; dan
- 4) Memfasilitasi penggunaan teknologi tepat guna di masyarakat. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Tentang

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, pengurus posyantek dan wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan. Kepengurusan posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat kecuali sekretaris posyantek, susunan dan jumlah pengurus posyantek disesuaikan dengan kebutuhan, pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus posyantek di kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Walikota. Pengurus posyantek harus memiliki kriteria:

- 1) Mewakikan unsur masyarakat, bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Memahami adat istiadat, dan berdomisili di kecamatan lokasi posyantek;
- 3) Peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, aktif, kreatif dan inovatif;
- 4) Memiliki kemampuan manajerial, memiliki motivasi untuk mengembangkan teknologi tepat guna;

- 5) Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- 6) Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- 7) Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
- 8) Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.



Gambar 10 . Struktur Organisasi Posyantek

Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta Nomor 155 Tahun 2015 Tanggal 2 April.

Tugas dari pengurus posyantek, diantaranya:

- 1) Ketua
 - a) Sebagai manajer pelaksana kegiatan harian;
 - b) Menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran;
 - c) Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
 - d) Mengatur dan mengkoordinir kegiatan;
 - e) Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan (laporan kegiatan dan laporan keuangan);

- f) Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
- g) Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2) Bendahara

- a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan.

3) Sekretaris

- a) Mengelola kesekretariatan posyantek; dan
- b) Bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama;

4) Komite Kemitraan

- a) Melaksanakan rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b) Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber teknologi tepat guna (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan atau pengguna teknologi tepat guna (masyarakat umum, petani, pengusaha kecil, home industri);
- c) Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
- d) Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah dan perkembangan posyantek.

5) Komite Sosialisasi

- a) Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya;

- b) Mensosialisasikan teknologi tepat guna kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - c) Mensosialisasikan teknologi tepat guna kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - d) Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan teknologi tepat guna kepada pemanfaat atau pengguna teknologi tepat guna;
 - e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan komite sosialisasi kepada ketua posyantek; dan
 - f) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan posyantek.
- 6) Komite Pengembangan
- a) Melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan teknologi tepat guna;
 - c) Melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan teknologi tepat guna;
 - d) Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan komite pengembangan kepada ketua posyantek; dan
 - e) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan posyantek.
- 7) Komite Wartek (warung teknologi)
- a) Memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

- b) Memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan teknologi tepat guna kepada masyarakat dan usaha kecil;
- c) Mempromosikan jenis-jenis teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- d) Memfasilitasi penggunaan teknologi tepat guna di masyarakat;
- e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan wartek kepada ketua posyantek;
- f) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan posyantek.

Dalam pelaksanaan tugasnya, posyantek perlu menjalin hubungan dengan lembaga lain, dalam Panduan Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, mekanisme hubungan kerja yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Hubungan kerja antara posyantek dengan kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- 2) Hubungan kerja antara posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif; dan
- 3) Hubungan kerja antara posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dari posyantek dibutuhkan sarana dan prasaran yang mendukung. Oleh karena itu sesuai dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, ruang pelayanan sekurang-kurangnya memiliki:

- 1) Ruang pelayanan teknologi tepat guna dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi teknologi tepat guna tersimpan dalam rak buku;

- 2) Ruang pertemuan dan atau peragaraan atau pameran produk teknologi tepat guna;
- 3) Ruang bengkel teknologi tepat guna; dan
- 4) Ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi pengurus posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.

Untuk kelancaran pengurus posyantek melaksanakan kegiatan sekretariat posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:

- 1) Perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
- 2) Perangkat layanan informasi teknologi tepat guna seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, leaflet, koran, majalah dan brosur) dan elektronik (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
- 3) Perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.



Gambar 11. Ruang Sekretariat Posyantek Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2017

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

a. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) DPPAPP Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama lima tahun 2013-2017. Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta. Untuk mencapai,

konsistensi yang harus dilakukan dari Implementasi target Rencana Startegis DPPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna adalah:

1) Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri.

2) Sasaran dan Indikator Keberhasilan

- a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

1. Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang akan dikembangkan dan dimasyarakatkan; dan
 2. Presentase masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mandiri.
- b) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan setelah mendapatkan pelatihan
1. Presentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang berusaha atau bekerja setelah mendapatkan pelatihan;
 3. Cakupan anggota lembaga musyawarah kelurahan yang aktif dalam penggerakan kegiatan gotong royong; dan Jumlah sarana yang dibangun atau direhab melalui fisik dana Bina Fisik Ling Jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang akan dikembangkan dan dimasyarakatkan; dan
 4. Presentase masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mandiri.
- c) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan setelah mendapatkan kepelatihan.
1. Presentase pemanfaat Bina Sosial PPMK yang berusaha atau bekerja setelah mendapatkan pelatihan;
 2. Cakupan anggota lembaga musyawarah kelurahan yang aktif dalam penggerakan kegiatan gotong royong; dan
 3. Jumlah sarana yang dibangun atau direhab melalui fisik dana Bina Fisik Lingkuagn PPMK.

Strategi adalah langkah yang memecahkan permasalahan untuk menghadapi suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai lima tahun. Sedangkan kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam periode Rencana Strategis (Renstra) yaitu lima tahun pada periode 2013-2017. Salah satunya misi dari DPPAPP Provinsi DKI Jakarta adalah “ Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan pemasyarakatan, dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.”

1) Strategi

- a) Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pemanfaatan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna; dan
- b) Peningkatan Posyantek yang berfungsi menjadi tegak dan mandiri.

2) Kebijakan

- a) Mengembangkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan
- b) Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pemanfaatan Warung Teknologi.

Untuk mencapai hasil maksimal dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan suatu indikator kinerja, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Penyusunan dan penetapan indikator kinerja DPPAPP Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-B5/2010 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten atau Kota;
- 5) Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79-II-Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014;

- 7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 133/PER/B1/2011 Tentang Rencana Strategis Badan, Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 Untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15/PER/MENTERI PP.PA/ Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014; dan
- 9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017. (Dokumen Rencana Strategis DPPAPP Provinsi DKI Jakarta).

Rencana Strategis (Renstra) bersifat dokumen jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja. Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerja regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. DPPAPP Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja (Renja) diantaranya

memuat: program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2018, maka selanjutnya tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta yang direalisasikan melalui beberapa program kegiatan pada tahun 2014, sebagai berikut:

- 1) Kajian pengembangan TTG dengan lembaga pemerhati TTG;
- 2) Perkuatan posyantek di DKI Jakarta;
- 3) Pengembangan Posyantek
- 4) Lomba cipta TTG tingkat SLTA dan perguruan tinggi;
- 5) Peningkatan kreativitas kader posyantek dan wartek;
- 6) Rakortek pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 7) Pengembangan TTG unggulan;
- 8) Temu konsultasi pengurus posyantek;
- 9) Advokasi atau sosialisasi pengembangan posyantek dan wartek;
- 10) Pembinaan pengurus posyantek dan wartek;
- 11) Pengembangan posyantek percontohan;
- 12) Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan hutan mangrove lestari; Pendampingan posyantek dan wartek;
- 13) Pengembangan keterampilan TTG bagi masyarakat pengguna TTG yang mandiri; dan

14) Penilaian posyantek kecamatan. (Dokumenn DPPAPPProvinsi DKI Jakarta)

“Rencana strategis yang dilakukan DPAPP untuk masyarakat lebih mengenal posyantek karena masyarakat masih banyak yang belum tau posyantek itu apa. Kita dari DPPAPP sudah mencoba memasang banner di setiap kecamatan DKI Jakarta biar masyarakat bertanya tanya apa itu posyantek. Karena masyarakat lebih mengenal posyandu di banding posyantek, padahal jika implementasi program posyantek berjalan dengan baik bisa menumbuhkan tingkat ekonomi di DKI Jakarta. Dari sekala kelurahan dengan adanya wartek (warung teknologi) lalu sampai ke tingkat provinsi. Pembinaan DPPAPP tetap ada, namun bersifat global jadi hasil binaan dari KPMP diangkat ke Provinsi baru kami mengevaluasi untuk menentukan usulan lomba nasional.” (Hasil wawancara pada 19 Juli 2017, pukul 09.00 WIB).
Juli 2017, pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara dengan S (L, 47 th) selaku Staff Subbid Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Bidang Teknologi Tepat Guna.

b. Tujuan Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan salah satunya yang dibuat oleh Pemerintah adalah Pos Pelayanan Teknologi (posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi jenis TTG. Warung Teknologi (Wartek) lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Desa atau yang sering di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teknologi Tepat Guna dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Pengembangan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk mengitkan fungsi, ,manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi.

Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat , dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Posyantek itu lembaga berdirinya berdasarkan dari undang-undang Kementrian Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2010 pemberdayaan masyarakat melalui TTG yang lebih kenal sebagai posyantek. Di DKI Jakarta mempunyai pergub untuk posyantek ini Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015 tujuannya lembaga masyarakat untuk lebih mengenal teknologi. Sebelumnya memakai manual lalu setelah adanya posyantek ini bisa memakai alat yang lebih meringankan atau memudahkan masyarakat.” (*Hasil wawancara pada 19 Juli 2017, pukul 09.00 WIB*).

Dari hasil wawancara dengan S (L,47 th) selaku Staff Subbid Pemasarakatan dan Pemanfaatan Bidang Teknologi Tepat Guna.

Tujuan Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk:

- a) Meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG.
- b) Menumbuhkembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan daerah
- c) Menciptakan kesempatan kerja baru
- d) Menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi dalam memberikan pembinaan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta lebih mengarah pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang TTG.

DPPAPP memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat. Sehingga setelah adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh provinsi, masyarakat dapat mengimplementasikannya dilingkungannya. Dalam Peraturan Gubernur tersebut, telah dijelaskan arah pemberdayaan yang harus dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta, namun pada pelaksanaannya DPAPP melakukan pembinaan lebih kepada pemberian pelayanan untuk masyarakat Berikut beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPPAPP pada tahun 2015-2016 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, yang tertuang pada Rencana Kerja (Renja) Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta, antara lain :

- 1) Kegiatan Klinik Desain Kemasan Produk Lokal Bagi Pengusaha Pengguna Teknologi Tepat Guna (TTG) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

a) Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang perkembangan inovasi teknologi serta manfaatnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup;
2. Diketuinya berbagai jenis alat teknologi tepat guna dan produknya secara visual oleh masyarakat sehingga masyarakat pengguna dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menetapkan pilihan;
3. Termotivasinya masyarakat untuk menggunakan TTG sesuai dengan kebutuhan masing-masing;

- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bank Sampah Percontohan Tahun 2015.

a) Tujuan

1. Bank sampah sebagai strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat “berkawan” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 5M (mengurangi, memilah, memanfaatkan, mendaur ulang, dan menabung sampah) sehingga manfaat

langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat; dan

2. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini warga masyarakat menjadi disiplin dalam mengelola sampah sekaligus mendapatkan tambahan pemasukan atau penghasilan dari sampah yang mereka kumpulkan.

3) Kegiatan Sosialisasi Posyantek Kepada Pengurus Posyantek atau Wartek dan Aparat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

a) Tujuan

1. Menyamakan persepsi dalam menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Mencari keterpaduan dan keselarasan program kerja dan kegiatan yang akan diusulkan dalam tahun anggaran berikutnya;
3. Mencari format rencana kerja dan tindak lanjut program kerja dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di bidang teknologi tepat guna dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
4. Menyajikan laporan program kerja dan kegiatan 2013-2018.

4) Kegiatan Temu Konsultasi Pengurus Posyantek di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

a) Tujuan

1. Mempertemukan pengurus posyantek dengan para pembina, baik dengan camat selaku pembina, pembina tingkat kota dan

pembina tingkat provinsi, untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang harmonis;

2. Mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh pengurus posyantek dan memberikan upaya pemecahan masalah, sehingga TTG dapat dimanfaatkan, dikembangkan di alih teknologikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kinerja posyantek sebagai pelayanan teknis, Kegiatan Rakortek Pengembangan dan Pemanfaatan TTG di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

a) Tujuan

1. Mengkonsolidasikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang aparat dan posyantek meliputi pengurus posyantek, pengurus wartek, aparat terkait di kecamatan dan kelurahan;
 2. Memperkuat komitmen pengurus posyantek, pengurus wartek, dan aparat terkait di kecamatan dan kelurahan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan posyantek kedepan; dan
 3. Mensinergikan program kerja posyantek antara pengurus posyantek atau wartek denga aparat instansi terkait.
- 6) Kegiatan Pendampingan Posyantek dan Wartek di Provinsi DKI Jakarta.

a) Tujuan

1. Mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh pengurus posyantek dan memberikan upaya pemecahan masalah, sehingga

TTG dapat dimanfaatkan, dikembangkan dialih teknologikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatan;

2. Memberikan pendampingan sehingga terjadi kemandirian dalam penerapan TTG di masyarakat;
- b) Memotivasi pengurus atau kader posyantek dan wartek untuk terus berinovasi dalam pengembangan TTG sesuai dengan potensi daerah;
- c) Mensosialisasikan pentingnya HAKI untuk proteksi alat atau produk TTG yang dimiliki; dan Memberikan rekomendasi dalam usaha pemasaran alat atau produk TTG yang dimiliki.

“DPPAPP melakukan pembinaan bukan hanya kepada pengurusnya tetapi juga kepada masyarakatnya, melalui pengurusnya DPPAPP memberikan pembinaan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. misalnya posyantek disitu memfasilitasi masyarakat, memberi masukan atau cara terbaru untuk melakukan yang lebih mudah dan simple kepada masyarakat yang dia tidak mengerti tentang kemasan, posyantek menyiapkan masyarakat yang butuh dibina. Intinya pembinaan diberikan menyesuaikan dengan kegiatan– kegiatan yang ada. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan posyantek tidak hanya fokus disana saja tapi kita juga fokus kepada bank sampah dan lingkungan, bagaimana cara mainseat masyarakat agar membuang sampah ke tempat yang telah disediakan bukan disungai atau digot.” *(Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).*

Pelaksanaan program–program pembinaan posyantek yang dilakukan oleh DPPAPP dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya. Mengacu pada tugas dan kegiatan dari posyantek dan pembinaan yang telah dilakukan oleh DPPAPP, sumber-sumber pendanaan kegiatan posyantek dapat berasal dari sebagai berikut:

- 1) APBD Kabupaten/ Kota,

APBD Kabupaten/ Kota digunakan untuk membiayai kegiatan inventarisasi, sosialisasi atau desiminasi informasi TTG, pengembangan TTG, dan pelatihan masyarakat, serta administrasi dan pemantauan Tim Pembina Kabupaten/ Kota.

2) APBD Provinsi

APBD Provinsi digunakan untuk membiayai operasional kegiatan administrasi, pemantauan dan pembinaan tim pembina Provinsi.

3) Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat

Bantuan dapat bersumber dari lembaga, perusahaan atau pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.

4) Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan:

- a) Membuka bengkel atau perbaikan TTG;
- b) Menyelenggarakan kursus atau pelatihan TTG;
- c) Menyediakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- d) Jasa pelayanan konsultasi;
- e) Hasil komisi atas penjualan barang dan kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan sendiri;
- f) Royalti atas HAKI yang dimiliki posyantek; dan
- g) Kegiatan usaha lain yang tidak melanggar huku

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang dimiliki posyantek harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;

- 2) Setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah;
- 3) Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian oleh bendahara;
- 4) Bila lokasi posyantek dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana posyanyek disimpan dibank;
- 5) Setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; dan
- 6) Setiap sebulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan kepada Bupati atau Walikota.

“Bentuk alokasi dananya melalui swadaya sendiri atau pengurus sendiri, sudah tidak ada lagi dana untuk posyanek ini dan tidak ada perda yang kuat. Kalau dulu ada misalkan kelompok masyarakat membutuhkan alat pancacak sampah, melalui ketua posyantek memfasilitasi lewat pemerintah kota atau kabupaten bisa juga dengan CSR, tapi itu dulu sekarang sudah tidak bisa. Mungkin saja bisa lewat CSR tetapi lewat pemda atau pemkot sekarang sudah tidak ada bentuk dana untuk posyantek. Jadi kalau masyarakat ingin alat posyantek hanya bisa menjebatani atau memfasilitasi lewat informasi dan dananya tidak bisa turun dari Pemda Sejak dari tahun 2016 dana untuk TTG ini tidak turun dikarenakan Pemda tidak ada alokasi dana khusus.” *(Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).*

Menurut S (L, 45 th) selaku Staff Subbid Permayarakatan dan Pemanfaat bidang dalam berjalannya 44 posyantek membutuhkan bantuan dana dalam melakukan kegiatannya, maka pada program kegiatan tahun 2015 provinsi memfasilitasi posyantek untuk dapat melakukan kemitraan dengan sektor industri/ BUMN/ BUMD/ Bank/ CSR dari suatu perusahaan swasta yang ada.

c. Sasaran Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran dalam program Posyantek dalam pemberdayaan masyarakat suatu bagian dari upaya yang ingin menjadikan teknologi sebagai alat pemerataan pembangunan ekonomi. Posyantek sebagai alat informasi pendekat atau menjembatani masyarakat pengguna teknologi dan sumber teknologi harus dikembangkan sebagai pelayanan publik dalam bidang jasa informasi dan penyedia teknologi tepat guna bagi masyarakat agar mandiri, dan profesional. Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan pengembeangan TTG sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan daerah. Menurut Undang-undang Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 Pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi:

- 1) Sasaran produksi mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing dipasar nasional.
- 2) Sasaran lingkungan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- 3) Sasaran pengelolaan sampah untuk meningkatkan teknologi daur ulang sampah.
- 4) Sasaran sosial kemasyarakatan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

- 5) Sasaran teknologi informasi untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 6) Sasaran teknologi lainnya pada penggalian dan pengembangan teknologi yang sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

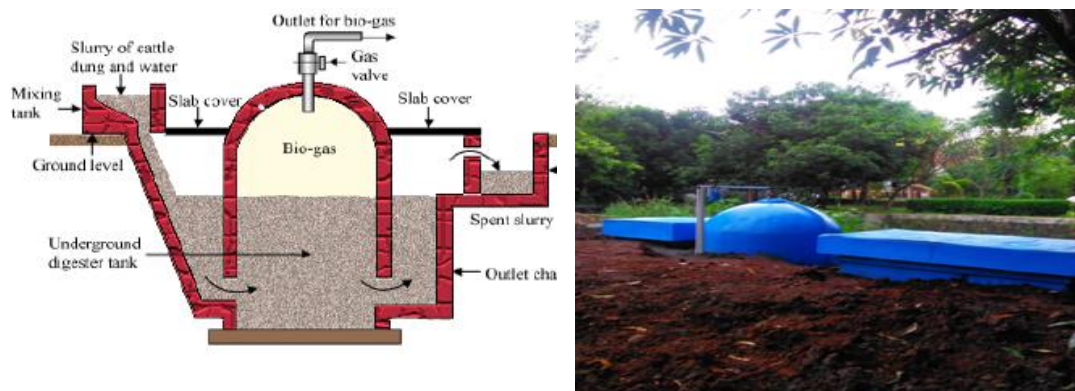
Dengan berjalannya pembinaan posyantek yang dilakukan DPPAPP sebagai cara untuk pemberdayaan masyarakat, dapat yang dipatkan oleh masyarakat.

“DPPAPP dan Posyantek harus saling menjaga komunikasi biasanya kita dari DPPAPP mengadakan forum ketua posyantek se DKI Jakarta agar kita tahu apa yang kurang dan dibutuhkan. Selain itu juga mengadakan monitoring untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kultur lingkungan dan budayanya. Setelah kita mengadakan forum pasti melihat yang mana posyantek yang lagi aktif dan membuat inovasi-inovasi terbaru. Setelah itu kita lihat tahap selanjutnya dan kita bakal mengikut sertakan posyantek tersebut di event daerah maupun nasional. Setiap tahunnya pasti ada posyantek yang membuat inovasi terbaru dari sumberdaya yang ada.” *(Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).*

Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dapat membantu masyarakat dalam menemukan hasil karya terbaru dan pengembangan teknologi. Hampir semua Posyantek yang ada di DKI Jakarta lebih mengarah ke lingkungan atau daur ulang sampah, memanfaatkan kreatifitas masyarakat sumberdaya yang ada, pelaksanaan kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam mananggulangi permasalahan lingkungan yang sering disoroti media dalam hal yang mengakibatkan banjir di DKI Jakarta. Salah satunya, seperti yang dilakukan posyantek di kecamatan kembangan, memanfaatkan sumberdaya manusia dapat membuat teknologi terbaru. Inilah hasil-hasil posyantek DKI Jakarta dalam melakukan perannya:

1. Penemuan baru dan Pengembangan Teknologi terbaru.

Dalam memberdayakan masyarakat pemerintah juga butuh bantuan dari masyarakat juga untuk mengurangi permasalahan pertumbuhan ekonomi. Posyantek membantu masyarakat dalam menciptakan dan pengembangan teknologi terbaru atau inovasi-inovasi terbaru dilingkungan kelurahan maupun kecamatan. Salah satu permasalahan di DKI Jakarta adalah banjir yang sering terjadi, faktornya salah satu karna masyarakat masih banyak yang membuat sampah ke sungai maupun ke got. Pemanfaatan lingkungan atau menjaga lingkungan yang dilakukan posyantek kecamatan jagakarsa sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Inilah salah satu hasil pemanfaatan lingkungan dari posyantek kecamatan jagakarsa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 12. Hasil Posyantek Kecamatan Kembangan

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017

Poyantek kecamatan kembangan bisa dibilang Posyantek yang paling aktif pada tahun 2016 dan selanjutnya dikarenakan berhasil mendapatkan penilaian dari Kementrian Desa untuk mengikut event nasional.

“Pada tanggal 5 oktober 2016 kami menyiapkan kesiapan posyantek kecamatan kembangan untuk mengikuti ajang nasional. Jika kami mendapatkan peringkat 6 maka loloslah kami, lokasinya bertepatan di Taman Aries RW 06 Jakarta Barat. Partisipasi warga disini juga saling bahu membahu untuk mempersiapkan ajang nasional ini, tidak hanya soal tenaga mereka juga memberikan sara baik dalam bentuk ide maupun finansial. Mereka membaaur dengan kami untuk menampilkan yang terbaik. Pak RW 06 ini sangat bagus sekali memberdayakan masyarakatnya dia berhasil menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Biogas ini penemuan dari Pak Rusli yang belajar dari Jerman dan didukung oleh masyarakatnya pake biaya sendiri. Pak With selaku RW 06 memberi masukan agar bagaimana caranya masyarakat membuang sampah ke biogas, Pak With bisa membedakan sampah yang mana yang harus dibuang ke biogas. Selain biogas posyantek kembangan juga fokus ke usaha menengah disetiap tahunnya pemetaan ada mesin apa penemuan mesin kuliner apa yang harus dibenahi, yahu pertama roti buaya, dan selanjutnya mesin-mesin yang dibutuhkan oleh pengusaha tersebut. Posyantek kecamatan kembangan sangat fokus untuk memberi informasi kepada masyarakat apalagi para pelaku usaha menengah agar tau teknologi apa yang terbaru, semisal membuat makanan atau daur ulang sampah bisa menjadi pupuk, sampah menjadi produk yang kreatif, produk yang bagus mungkin dri kemasan yang belum cantik itu posyantek yang memasarkan.”(Hasil wawancara pada tanggal 21 july 2017, pada pukul 10.00 WIB)

Tabel 4. Pemberdayaan Posyantek di Kecamatan Kembangan

NO	WARTEK	PRODUK	TTG
1.	Meruya Utara	1) Biogas (Widyatmoko) 2) Roti Cull (Irma) 3) Daur ulang pelepah pisang(Niken) 4) Daur ulang perca (Metavia) 5) Accesories daur ulang perca batik (Ade) 6) Krupuk Gemdar Belas (Siti)	1) Alat biogas&Pemcacak sampah 2) Miker Skala Besar 3) Alat Presing pelepah pisang 4) Proses daur ulang 5) proses daur ulang 6) Proses pembuatan
2.	Joglo	1) Daur ulang koran (Ranny) 2) Daur ulang perca (Naning) 3) Abon Ikan Nila (Lilik) 4) Bir Pletok (Susi) 5) Cheese Stick (Ermawaty) 6) Kripik Kentang (Siti Hollah)	1) Proses& daur ulang 2) Proses daur ulang 3) Spinner& Pressing Plastik 4) Proses Pembuatan 5) Pressing Plastik 6) Pemotong Kentang
3.	Kembangan Selatan	1) Aneka olahan rumput laut (Ati) 2) Es goyang (Muhidah) 3) Sepatu & Sandal Rajut (Atleh)	1) Proses pembuatan 2) Proses pembuatan 3) Proses pembuatan 4) Proses daur ulang

		4) Daur ulang perca (Tuti Handayani)	
4	Srengse ng	1) Roti Buaya (Hasby) 2) Kembang Goyang (Ninda) 3) Dodol Betawi (Mande) 4) Aneka Makanan Betawi (Taty Sadeli)	1) Mixer & Pisau pemotong 2) Presing plastik 3) Proses pembuatan 4) Proses pembuatan
5	Meruya Selatan	1) Daur ulang dari kemasan plastik (Suminar) 2) Blr Pletok (Rini) 3) Selendang Mayang (Bonel)	1) Proses daur ulang 2) Proses pembuatan 3) Proses Pembuatan
6	Kembangan Utara	1) Dodol Betawi (Aam) 2) Selendang Mayang (erosmawati) 3) Jahe Instant (Lastri) 4) Keriok singkong (Funky)	1) Proses pembuatan 2) Proses Pembuatan 3) Proses Pembuatan 4) Proses Pembuatan

Sumber : Posyantek Kecamatan Kembangan 2017

Posyantek Kecamatan Kembangan, melakukan kegiatan sosialisasi posyantek:

- Sosialisasi kepada masyarakat dan wartek
- Melakukan pertemuan rutin 2 bulan sekali
- Mengunjungi kegiatan masyarakat dan memberikan pelatihan
- Mendirikan bank sampah wilayah kec. Kembangan
- Pelatihan berbagai macam kerajinan



Gambar 13. Hasil Posyantek Kecamatan Kembangan

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017

2. Memberikan nilai tambah dan produktivitas masyarakat.

Provinsi DKI Jakarta mempunyai sumber daya alam yang terbatas, sumber daya yang ada di DKI Jakarta hanya berpotensi sumberdaya laut yang cukup besar selebihnya sudah dipakai untuk bangunan infrastruktur yang semakin maju. Oleh karena itu, pengembangan teknologi yang dilakukan oleh posyantek, menghasilkan suatu alat. Teknologi tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tersebut. Posyantek DKI Jakarta lebih mengarah kepada daur ulang sampah dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Pemerintah membantu kegiatan ini untuk menanggulangi permasalahan yang ada akibat banjir yang ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sampah.

“Lingkungan merupakan salah satu hal yang diutamakan oleh pemerintah, faktor yang paling kita perhatikan yaitu sampah. Masyarakat masih banyak yang kurang sadar untuk buang sampah pada tempatnya yang mengakibatkan banjir atau rusaknya lingkungan. Pemerintah disini mempunyai peran untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah dan memberi mainseat agar menjaga lingkungan dan membuat kegiatan bank sampah yang sudah dilakukan.” (*Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB*).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan S (L, 47 th) selaku Staff Subbid Pemasarakatan dan Pemanfaatan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi, kegiatan yang dilakukan oleh posyantek di DKI Jakarta lebih kepada memanfaatkan sampah sebagai kegiatan pemberdayaannya. Selain menambah pendapatan masyarakat, kegiatan ini juga membantu pemerintah dalam menanggulangi salah satu permasalahan di Provinsi DKI Jakarta yaitu sampah. Selain posyantek kecamatan pasar minggu, posyantek kecamatan jagakarsa juga membuat alat yang memanfaatkan sampah rumah tangga.

Posyantek Jagakarsa, memanfaatkan limbah got agar dapat dimanfaatkan untuk salah satu bahan campuran membuat batako, pupuk cair dan pupuk padat. Pengelolaan limbah got yaitu pasirnya menjadi salah satu bahan baku pembuatan batako, sedangkan airnya menjadi bahan baku dari pembuatan pupuk cair untuk tanaman, dan lumpurnya menjadi bahan baku dari pupuk padat untuk tanaman. Selain itu posyantek kecamatan jagakarsa, menciptakan mini komposter sebagai media untuk membuat kompos skala rumah tangga. Sehingga masyarakat dapat membuat kompos ditempat tinggalnya secara mandiri. Mini komposter ini membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah. Salah satu hasil dari posyantek kecamatan jagakarta untuk menanggulangi permasalahan sampah di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 14. Hasil Posyantek Kecamatan jagakarsa
Sumber : Posyantek Kecamatan Jagakarsa Tahun 2014

Pembinaan yang dilakukan DPPAAPP melalui posyantek membuat meningkatnya pendapatan masyarakat, salah satunya bermunculannya ukm di provinsi DKI Jakarta.

“Filosofinya jangan kamu cari yang ada diposyantek, tapi menjadi apa kamu diposyantek. Mengikuti filosofi itu kami akhirnya ada 17 item penemuan di Jagakarsa, ada 6 kios yang tersebar. Tahun 2001-2002 mulanya cuma 15 ukm, terus sampai sekarang jumlahnya udah 80 unit yang tersebar di 6 kelurahan.”(Hasil wawancara pada 23 july 2017, pukul 15.00 WIB)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan A (L, 47 th) selaku ketua posyantek kecamatan jagakarsa, adanya posyantek menumbuhkan ukm-ukm yang ada disuatu wilayah jika masyarakatnya mau mengembangkan diri diposyantek. Salah satu peran DPPAPP adalah membantu masyarakat memasarkan hasil produk dari penggunaan TTG yang sudah mereka terapkan diusaha mereka. Melalui posyantek, masyarakat memasarkan hasil usahanya pada *stand-stand* yang disediakan dalam setiap acara yang bekerja sama dengan DPPAPP.



Gambar 15. Stand Posyantek Kecamatan jagakarsa di Pameran Flora & Fauna Tahun 2017

Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

a. Faktor Pendukung

Suatu kebijakan dirumuskan dan dibuat untuk di implementasikan demi mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pasti memiliki faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu program, begitu pula dengan implementasi program Posyantek. Dalam Implementasi Program Posyantek dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat terlepas dari beberapa faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, maupun struktural birokrasinya. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi program posyantek dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang meliputi:

1) Komunikasi

Faktor Komunikasi sangat berpengaruh di dalam implementasi sebuah program dikarenakan hal tersebut sangat dibutuhkan dalam koordinasi antara *stakeholder* dan pelaku kebijakan. Hubungan implementator terhadap apa yang dilakukan, apa tujuan dilakukannya program, hingga target dari program tersebut sangat tergantung dalam komunikasi yang dibangun oleh tiap-tiap *stakeholder* yang ada. Komunikasi sangat mendukung dalam mendukung suatu program yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Selaku Staff Kabid dan Informasi DPPAPP yaitu:

“komunikasi yang kami bangun dari DPPAPP memberi pelayanan dan informasi terhadap posyantek-posyantek yang aktif tegak dan mandiri. Setiap 1 tahunnya kami mengadakan seminar atau arahan dengan mengundang ketua posyantek di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Kami sudah akrab dengan mereka keluhan mereka pasti kami tampung dan dijadikan bahan evaluasi DPPAPP. Biasanya salah satu ketua posyantek juga menghubungi kami menanyakan apakah ada alat yang baru yang mudah didapatkan, jika ada pasti kami beritahu sebagaimana mestinya. Sangat penting sekali memang komunikasi bahkan kami juga berteman di media sosial untuk tahu juga bagaimana prospek posyantek-posyantek. *(Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB)*

Penyebaran informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh posyantek dengan pengenalan tentang posyantek dan penjelasan mengenai TTG pada masyarakat, serta langsung memberikan contoh dalam penggunaannya dapat diterima dengan baik oleh kelompok masyarakat. Maka dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kelompok masyarakat pelaku usaha, maka mereka akan lebih menganal TTG sehingga kegiatan produksi berjalan efektif dan efisiensi. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang didesain sesuai dengan aspek lingkungan, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat pemanfaatan teknologi tepat guna salah satu alat program pemberdayaan masyarakat.

“Dengan adanya teknologi ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka, seperti halnya jika ukm masih butuh teknologi dengan menggunakan alat lebih canggih dan dapat dicari itu bisa diberi informasi lewat posyantek, seperti halnya mesin pencacak sampah yang sebelumnya masyarakat masih menggunakan manual itu bisa dirancang dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bisa lebih simple dan tidak perlu repot-repot untuk membersihkan sampah ditempatnya. *(Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).*

Dengan pernyataan tersebut cukup menggambarkan jika daripada komunikasi yang di bangun tidak cukup mendukung berjalannya implementasi program ini.

Komunikasi sangat berperan terhadap proses perencanaan dan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dengan masyarakat. Selain aspek perencanaan dan koordinasi, komunikasi juga mendukung implementasi program ini melalui cara DPPAPP dalam memberikan bimbingan atau arahan hingga pelatihan terhadap posyanteK agar mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2) Sumberdaya

Untuk mendukung implementasi program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta lebih efektif, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumber daya finansial. Dalam praktiknya untuk mendukung implementasi programnya, pihak yang ada di internal DPAPP mencoba mengoptimalkan pihak eksternal yang ada di pengurus posyanteK yang aktif, tegak maupun mandiri. Pihak internal DPPAPP yang dimaksud adalah ketua staf yang masuk jajaran dalam divisi bidang teknologi tepat guna dan informasi yang ada di DPPAPP. Kemudian yang dimaksud pihak eksternal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan posyanteK di setiap kecamatannya yang terlibat langsung dengan program ini. Jika dilihat dari regulasi yang dibuat pemerintah pusat itu menjadi acuan untuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk cukup dapat menjadi faktor pendukung berjalannya program posyanteK. Sumber daya manusia internal DPPAPP sudah terdapat divisi dari ketua hingga staf yang sudah memiliki

pengalaman untuk melakukan program pada bidangnya. Dari segi perencanaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk juga di bantu oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Perempuan (KPMP) yang ada pada kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Dari faktor yang terakhir terdapat sumber daya keuangan, dijelaskan di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2015.

3) Disposisi

Pada pelaksanaanya implementasi program tidak dapat dilepaskan dari peran para implementator yang ada dilapangan. Setiap implementator memiliki sikap dan disposisi yang berada pada setiap individunya. Efetif tidaknya proses implementasi sedikit banyak disposisi dari setiap implementasi akan memiliki pengaruh. Untuk mengantisipasi terjadi disposisi yang kurang baik atau tidaknya visi dan misi yang sama serta antara implementator dengan DPPAPP, maka DPPAPP mengadakan pelatihan bagi setiap implementator dilapangan agar dapat memahami apa yang harus dilakukan dalam program, kemudian memahami apa yang di maksud dari tujuan dan sasaran program posyantek dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi salah satu faktor pendukung dalam program implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta karena aspek struktur begitu penting dalam perorganisasian. Struktur Birokras di dalam pelaksanaan program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta langsung melaksanakan

kegiatan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya baik dilapangan maupun di kantornya. Dari sisi internal yang menangani pemberdayaan masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dari Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi dengan dasar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 155 Tahun 2015 tentang pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna. Namun dalam pelaksanaan yang ada di lapangan dalam melaksanakan implementasi program ini adalah lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) sebagai pembina kelompok masyarakat yang mempraktikan program posyantek. Dengan adanya peran posyantek tersebut membuat DPPAPP menjadi lebih mudah berkoordinasi dengan para implementator dilapangan.

b. Faktor Penghambat

Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta selain ada faktor pendukungnya juga ada faktor penghambat dengan berjalannya proses implementasi program ini baik secara internal maupun external. Beberapa faktor penghambat implementasi program posyantek yaitu:

1) Komunikasi

Salah satu faktor yang menjadi kelemahan dalam implementasi posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah komunikasi antara *stakeholder* dan pelaku program. Masih banyak posyantek yang belum mengenal posyantek dan wartek.

“Dari DPPAPP sendiri sudah berusaha untuk mengenalkan posyantek ini kepada masyarakat sampai kita sudah memasang banner disetiap kecamatan. Tetapi balik lagi posyantek ini lembaga sosial dan itu yang menjadi kesadaran masyarakatnya sendiri.”(Hasil Wawancara 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).

Penjelasan diatas memberikan maksud bahwa penghambat dalam pelaksanaan program posyantek adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap posyantek. Sesuai dengan perkataan S (L,47 th) Selaku Staff Subid Pemasyarakatan, DPPAPP tidak dapat memaksakan posyantek dimasyarakat dikarenakan posyantek merupakan lembaga sosial yang dilakukan oleh masyarakat secara suka rela walaupun sudah ada hukum yang berlaku untuk posyantek dikecamatan. Faktor penghambat dalam komunikasi seperti itu kurangnya pemahaman implemantator dalam menjalankan tugas.

“Hambatan yang didapat dari kami adalah posyantek yang aktif dan tegak karena posyantek ini hanya ada pengurusnya tetapi tidak berjalan dengan efektif karena punya sibukan lainnya. Kami sudah sering mengingatkan dan terjun lapangan untuk melakukan pembinaan tetapi balik lagi posyantek ini lembaga sosial. Berbeda dengan posyantek yang mandiri, mereka sangat cepat tanggap dalam melakukan implementasi program posyantek ini, dikarenakan pengurus yang mandiri dalam mencari inovasi-inovasi terbaru.” *(Hasil wawancara pada 19 july, pukul 09.00 WIB)*

Hambatan ini perlu ada gagasan dan inovasi terbaru dari DPPAPP yang perlu untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat luas untuk lebih mengenal posyantek agar sukses dalam mencapai tujuan implementasi program posyantek dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Agar tidak muncul kesalahpahaman antara stakeholder dengan kelompok masyarakat yang ingin mengenal posyantek tetapi masih tidak tahu apa arti posyantek itu sebenarnya.

2) Sumber daya

Faktor penghambat selanjutnya berkaitan dengan sumber daya manusia dan finansial yang terlibat dengan program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Di perlukan pengurus posyantek yang ingin dan niat menjalankan posyantek untuk melakukan pemberdayaan masyarakat T (P,28 th) Selaku staf Subid Pemasyarakatan. Peran DPPAPP sebagai fasilitator untuk mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri untuk mencapai kesejahteraan.

“Pengurus poyantek tidak hanya untuk mengurus posyantek saja karena merka pasti punya kesibukan lain, jika ada posyantek yang aktif pun itu mayoritas ibu-ibu karena mereka memanfaatkan waktu luang untuk berkontribusi juga. Kerja bakti yang dilakukan RT/RW saja biasanya hari libur nah posyantek ini tidak begitu harus sering dikontrol juga jika ingin programnya tercapai. Dari kita sudah sering mengundang mereka untuk memberi sosialisasi, banyak juga yang punya gagasan terbaru tapi ada juga yang belum bisa menghasilkan sesuatu.”(*Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00*).

Dukungan dana sering sekali menjadi hambatan untuk program yang dilakukan pemerintah, dengan tidak adanya dana ini program tersebut tidak berjalan. Poyantek di Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri. Di setiap kota adminstratif pasti ada yang menjadi 3 kriteria ini, tergantung dari masyarakatnya yang peduli atau tidak. Posyantek dengan kriteria mandiri sudah tidak memanfaatkan dana kepada pemerintah dikarenakan sudah mempunyai sumber dana tersendiri atau berkerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Jika posyantek aktif dan tegak itu berbeda dengan mandiri karena masih tergantung terhadap biaya opersional pemerintah.

“Dengan adanya teknologi di masyarakat bisa meningkatkan perekonomian. Tetapi semuanya butuh dana, semenjak tahun 2016 kami dari DPPAPP tidak memberikan dana untuk posyantek ini dikarenakan tidak ada lagi regulasinya, jadi kami bisa memberi mereka informasi dan pelatihan-pelatihan menjadi pengurus posyantek dan memberdayakan masyarakat. Di tahun 2012-2014 ada dana binaan namun itu pun tidak full sampai 2014 akhir malah Cuma sampai tahun 2013, dana yang diberikan dari provinsi sebesar Rp. 100.000.” Mungkin ini sangat mempengaruhi karena tidak adanya dana, namun tidak menutup kemungkinan posyantek itu bakal tidak ada. Malahan banyak posyantek yg mau berkembang disetiap kecamatan.” *(Hasil wawancara pada 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).*

Kurangnya dukungan dana ini membuat program posyantek ini menjadi terhambat, apalagi posyantek yang masih aktif dan tegak yang masih butuh sekali arahan dan informasi dari DPPAPP T(P, 28 th) selaku Staff Subid Pemasyarakatan. Dengan tidak adanya regulasi yang mengatur dana posyantek membuat DPPAPP mempunyai keterbatasan dalam memberi alat TGT dan fasilitas pendukung untuk kesekitaran posyantek. DPPAPP hanya mampu memberi informasi dan pelatihan-pelatihan dengan mengundang kelompok masyarakat atau ketua posyantek setiap 2 tahun sekali.

3) Disposisi

Pada faktor penghambat selanjutnya adalah disposisi yang ada didalam implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Penghambat di dalam implementasi program ini berdasarkan temuan dilapangan bukan berasal dari pihak implementator maupun dari DPPAPP melainkan dari kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya program posyantek dalam kehidupan mereka. Disposisi didalam implementasi berjalan dengan baik dan optimal bukan saja tidak bergantung pada implementator

melainkan disposisi juga memerlukan kesadaran masyarakat yang belum memahami tentang posyantek dalam pengaruh keberhasilan program ini. Dilihat dari temuan dilapangan tersebut dengan banyaknya posyantek yang masih aktif dan tegak saja akan mempengaruhi berjalan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

4) Struktur Birokrasi

Faktor penghambat terakhir dalam implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah kurang aktifnya pengurus posyantek di dalam pelaksanaan program posyantek. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi implementasi program posyantek, karena masih ada pengurus posyantek yang mandiri dalam menjalani program ini. Dari pihak DPPAPP sendiri sudah memberikan bekal untuk menjalankan posyantek dalam pemberdayaan masyarakat untuk di lapangan.

“Posyantek ini lembaga sosial, lembaga sosial itu kan lembaga yang memang diurusin sama masyarakat sendiri jadi kami tidak bisa memaksa masyarakat. Dari pengurusnya harus ada keinginan dia harus bisa menjiwai bahwa fungsi pengurus di masyarakat itu seperti ini tapi ternyata dia belum bisa menjiwai jadi hanya kalau diundang istilahnya dapat transport selesai. Padahal kan harapan kita kalau kita undang mereka kita kasih sosialisasi atau kita melakukan pelatihan harapan kita mereka mengimplementasikan diwilayahnya masing-masing namun ada kendalanya. Mereka hanya berharap *„gue kasih dong operasional supaya bisa mengimplementasikan dimasyarakat“* ada yang seperti itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 19 July 2017, pukul 09.00 WIB).

Menurut S (L, 47 th) selaku Staff Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi DPPAPP, peran DPAPP sebagai fasilitator untuk mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri untuk mencapai kesejahteraannya. Diperlukan pengurus yang mempunyai keinginan dalam menjalankan posyantek.

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Implementasi Program Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Program posyantek untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkat kesadaran akan lingkungan serta perekonomian untuk mengurangi angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Bentuk peran pemerintah memberikan pelayanan publik, pemerintah sebagai pemberi pelayanan berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Salah satu bentung tanggung jawab pemerintah menjadikan masyarakat untuk mampu mandiri agar dapat diarahkan pada pemikiran yang maju. Pemerintah melakukan dengan cara merubah perilaku dan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sesuai dengan penuturan Theresia et. Al. (2014:110) mengatakan pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi.

Selanjutnya, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, yang dijadikan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut dengan Posyantek atau Pos Pelayanan Teknologi. Posyantek adalah Lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan

orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015 Tentang pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, untuk membantu implementasi program posyantek untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharno (2008:187) mendefinisikan proses implementasi program perlu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan peningkatan dalam kehidupannya.

Teknologi dan kehidupan manusia merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sehingga teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang diciptakan untuk membuat atau membantu kehidupan manusia lebih mudah. Selain itu menurut D. Bell dalam Besari (2008:147) menyatakan bahwa teknologi pada dasarnya instrumen untuk memperbesar (*expand*) kekuasaan manusia (*human powers*) dalam kekayaan (*wealth*). Penyalahgunaan teknologi secara berlebihan bisa mengakibatkan berbagai masalah, sehingga diciptakanlah teknologi baru yaitu teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna merupakan solusi dari penggunaan teknologi di masyarakat, dikarenakan teknologi tepat guna diciptakan sesuai dengan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan cocok diterapkan di Indonesia. Sesuai dengan penuturan Tanaka (2005:ix), teknologi tepat guna memiliki definisi ganda, secara umum teknologi tepat guna dapat didefinisikan sebagai teknologi yang sesuai dengan kondisi dimana teknologi tepat tersebut digunakan atau diterapkan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga masyarakat setempat mudah berpartisipasi dan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Melihat

manfaat yang didapat dari teknologi tepat guna melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Penerapan ini mempunyai tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menunjang pengembangan wilayah melalui kualitas sumber daya manusia, dan mendorong tumbuhnya inovasi terbaru di bidang teknologi.

Maka dari itu, SK yang telah dikeluarkan gubernur dan dibantu oleh walikota untuk pengurus Pos pelayanan teknologi atau Posyantek di setiap kecamatan merupakan variabel-variabel utama dalam memberi kontribusi keberhasilan dalam implementasi posyantek di kecamatan. Dalam dasar hukum tersebut dijelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan kegiatan dan bentuk dukungan pemerintah dalam pelaksanaan posyantek dikecamatan. Salah satu bentuk keseriusan para pelaku kebijakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna. hal ini seperti yang diungkapkan dalam implementasi Menurut Edward III (1980) dalam implementasi ada 4 variabel utama yang di anggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi (Communcation)
- b. Sumber daya (Resources)
- c. Disposisi (Disposition)
- d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Stucture)

Berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh penyajian data, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui posyantek, dengan pembinaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk telah melaksanakan Program Pos Pelayanan Teknologi dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi DKI Jakarta menggunakan model

implementasi Edward III . Adapun aspek yang merupakan faktor- faktor terhadap model Implementasi Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Empat aspek tersebut berkaitan dengan proses program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Model implementasi Edward III (1980) menekankan pada aspek komunikasi . Aspek komunikasi dalam program posyanteK dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan adanya DPPAPP memberi pelatihan-pelatihan kepada posyanteK-posyanteK yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada Camat sebagai penanggung jawab posyanteK dan wartek di kecamatannya. Camat bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan posyanteK, ada Ketua PosyanteK yang menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terjun langsung ke lapangan dan mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat kecamatan maupun kelurahan. Selanjutnya DPPAPP mempunyai Staff Subbid Pemasyarakatan Infomarsi dan Teknologi untuk memantau 44 posyanteK-posyanteK yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu tugasnya juga memberi bimbingan dan arahan dalam melakukan program posyanteK kepada masyarakat di setiap kecamatan. *Resouces* pada model implementasi kebijakan Edward III (1980) menekan pada aspek sumberdaya pendukung khususnya manusia. Implementasi program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat memiliki sumber daya pendukung yaitu masyarakat di setiap kecamatan yang menjalankan kegiatan posyanteK. Selanjutnya pada aspek *diposition* Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980) beranggapan kecakapan saja tidak cukup, dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan program.

Hal ini dibuktikan ketika DPPAPP terjun lapangan dalam memberi informasi atau memberi pembinaan kepada 44 posyantek Jakarta ketika diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat DPPAPP dan Ketua Posyantek saling berkoordinasi untuk saling melakukan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tahap struktur birokrasi yang menekankan penyelenggaraan implementasi program posyantek dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dibantu oleh Camat dan Ketua Posyantek. Penjelasan ini dalam proses implementasi program posyantek dalam pemberdayaan masyarakat yang termasuk model implementasi kebijakan Goerge Edward III yang merupakan faktor komunikasi.

a. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran di Provinsi DKI Jakarta, berangkat dari isu-isu strategis maka dari itu Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk merencanakan berawal dari isu-isu strategis yang ada di Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 335/2013 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017. Rencana strategis ini menjadi pedoman DPPAPP dalam melakukan pemberdayaan salah satunya isu strategis pada pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna. Rencana Strategis ini disusun dengan berbagai analisis dan tahapan setelah itu menghasilkan tantangan permasalahan dan peluang permasalahan dalam urusan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna. Pemberdayaan masyarakat upaya menjadikan masyarakat berdaya dengan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri, sehingga penerapan teknologi tepat guna merupakan salah satu alternatif cara pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Anwas,2013:3). Selanjutnya tantangan dan peluang Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dalam urusan pemberdayaan masyarakat dipaparkan dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2013-2017:

1) Tantangan

- a) Kurang optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam menciptakan keberdayaan masyarakat;
- b) Kurang berfungsi Kader pemberdayaan masyarakat yang sudah dilatih untuk melaksanakan tugasnya;
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan;
- d) Rendahnya implementasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat;
- e) Belum tersedianya tenaga program pemberdayaan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan;

- f) Kurang ketersediaan data dan informasi pemberdayaan masyarakat yang akurat;
 - g) Belum optimalnya pengelolaan dana PPMK Bina Fisik, Bina Sosial, dan PNPM Mandiri Perkotaan oleh masyarakat;
 - h) Belum optimalnya pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat;
 - i) Belum optimalnya promosi alat atau produk TTG yang dibutuhkan masyarakat;
 - j) Belum optimalnya pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kecamatan dan Warung Teknologi (Wartek) di Kelurahan;
 - k) Kurang kesadaran masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir;
 - l) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penataan lingkungan dan pengelolaan limbah rumah tangga;
 - m) Teknologi (Wartek) Belum optimalnya peran masyarakat dalam berinovasi TTG; dan
 - n) Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) kecamatan dan kelurahan tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan Warung).
- 2) Peluang
- a) Tingginya dukungan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Politik dalam Program Pemberdayaan Masyarakat;

- b) Terdapatnya ribuan kader Pemberdayaan Masyarakat dan Posyantek, yang telah dibekali pengetahuan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan posyantek;
- c) Adanya kegiatan-kegiatan secara terpadu antara lain kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Kelurahan, Lomba Kelurahan dan Gelar Teknologi Tepat Guna;
- d) Lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat pada pembangunan di tingkat kelurahan cukup memadai;
- e) Dukungan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menstimulasi peningkatan partisipasi masyarakat;
- f) Potensi tokoh masyarakat yang perlu didayagunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
- g) Dukungan pemerintah dan stakeholder dalam mendorong pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) serta potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- h) Pemanfaatan mobil display teknologi tepat guna.

Oleh karena itu teknologi tepat guna memerlukan strategi, menurut Suharto dalam Anwas (2013:87-88), penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 5P, Pemukiman, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan. Dalam rangka Pemberdayaan masyarakat melalui posyantek DPPAPP Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa strategi. Strategi ini diberikan agar pemberdayaan yang dilakukan dapat dirasakan dan masyarakat terus berinovasi dalam menemukan dan mengembangkan teknologi-teknologi dalam pemanfaatan sumber daya yang dilingkungannya dan sesuai dengan visi, misi,

tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan dari Renstra DPPAPP adalah

- 1) Dengan Menerapkan posyantek pada 44 kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Membagi posyantek menjadi tiga kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri.
- 3) Memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP telah melaksanakan kegiatan pembinaan pada tahun 2013-2014 sesuai dengan Renstra dari DPPAPP Provinsi DKI Jakarta melalui tahap-tahap pemberdayaan, yaitu:

- 1) DPPAPP Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan keberadaan posyantek dan wartek yang merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dapat memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG, dikarenakan posyantek adalah lembaga yang dapat menjawab permasalahan yang ada disuatu lingkungan.
- 2) DPPAPP Provinsi DKI Jakarta mendorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat sehingga masyarakat lebih aktif dalam memanfaatkan sumber daya melalui teknologi tepat guna sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
- 3) DPPAPP Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi untuk posyantek yang terpilih untuk dapat memamerkan hasil penemuan dan pengembangan teknologi yang sudah ditemukan dengan mengikuti perlombaan dilingkup provinsi maupun nasional, dan juga posyantek difasilitasi untuk dapat mengisi *stand-stand* yang disediakan dalam setiap acara yang bekerja sama dengan DPPAPP sehingga posyantek dapat memamerkan dan menjual hasil dari posyantek.

Upaya yang dilakukan oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna telah sesuai dengan tahap pemberdayaan yang diungkap menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, dalam Soere (2012:42), memiliki 3 tahap pemberdayaan masyarakat, Penyadaran, Pengkapasitaan, Pendayaan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna yang dilakukan oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya serta tahap-tahapan dan sedemikian rupa. Setelah itu dengan adanya posyantek dapat membantu memberikan nilai tambah bagi kegiatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal.

b. Tujuan Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan adanya pemberian SK Gubernur dan walikota untuk pengurus posyantek di setiap kecamatan merupakan tujuan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna. Lewat program posyantek yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk membuat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta sependapat dengan Saiful (L, 47th) sebagai staff subid pemberdayaan masyarakat dan informasi tepat guna tujuan program posyantek untuk menaikkan

perekonomian masyarakat. Dengan adanya Posyantek ini membina masyarakat di kecamatan dan untuk dikelurahan itu ada warung teknologi (wartek) untuk memberi layanan setempat.

Pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta diharapkan sesuai dengan tujuan dan harapan. Menurut Theresia et.al. (2014:1593) Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan Saiful (L, 47 th) yang berpendapat memberikan layanan kepada masyarakat setempat perlu juga kesadaran masyarakat yang tinggi agar dapat membantu keberhasilan tujuan program posyantek dalam pemberdayaan masyarakat. Pada tujuan program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat sama dengan sasaran yang ingin mensejahterahkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan dapat diukur dari segala kegiatan yang berjalan dengan baik, melihat tujuan dari hasil kegiatan posyantek dalam pemberdayaan masyarakat. Akil (L, 45th) selaku ketua posyantek kecamatan jagakarsa menyatakan banyak masyarakat yang ingin mengembangkan umkmnya. Informasi yang diberikan posyantek sangat membantu untuk masyarakat, karena informasi tersebut bisa mendapatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang gampang dicari bukan hanya di daerah DKI Jakarta saja namun di setiap daerah.

Oleh sebab itu DPPAPP Provinsi DKI Jakarta menyakini dengan adanya posyantek dapat membantu masyarakat memberikan nilai tambah bagi kegiatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal. Tetapi apa yang dilakukan oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna, lebih kepada memberikan pembinaan, informasi dan sosialisasi kepada posyantek. Selain itu DPAPP juga sudah tidak memberikan dana operasional kepada posyantek, seperti yang diungkapkan posyantek kembangan pemberian dana operasional oleh DPPAPP terakhir diberikan sampai tahun 2013.

Selanjutnya bantuan alat kepada 44 posyantek hanya diberikan secara acak, dikarenakan sudah tidak ada lagi sk dari Gubernur atau DPPAPP. Permasalahan pemberian dana operasional tidak bermasalah terhadap berjalannya kegiatan posyantek yang berkriteria mandiri dan beramasalah bagi posyantek yang berkriteria tagak dan aktif, karena sangat perlu dana operasional agar mendukung dalam menemukan produktivitas teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dilingkungannya. Jika dilihat dari variabel yang dianggap memberikan pengaruh terhadap implementasi menurut Goerge Edward III, (1980,148) salah satunya adalah dukungan sumber daya manusia atau sumber daya alat. Pengerjasalan dari DPPAPP jika mereka hanya bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat, semenjak tahun 2014 sampai saat ini DPPAPP tidak memberikan alat kepada 44 posyantek yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan pemberian dana operasional mereka sudah tidak lakukan. Dari pengalokasian APBD untuk pemberian dana operasional untuk operasional posyantek setiap

bulanya tidak ada sampai saat ini. Maka dari itu, program kerja tahun 2015 DPPAPP Provinsi DKI Jakarta memafilitasi posyantek agar dapat menjalin kerjasama dengan sektor industri/ BUMN/ BUMD/ CSR. Dari program posyantek ini DPPAPP mengharapkan tidak selalu bergantung dengan pemerintah untuk pendanaan setiap bulanya dalam melakukan kegiatan, agar dapat melakukan pemberdayaan masyarakat di kecamatan maupun dikelurahan sesuai dengan tujuan.

c. Sasaran Program Posyantek dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran program posyantek dalam meningkatkan pemberdayaan di Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengungkit ekonomi masyarakat disetiap kecamatan melalui teknologi tepat guna. Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna memiliki dampak yang baik jika implementasinya dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan ekonomi atau usaha masyarakat yang lemah atau merintis dari nol juga memberi kemampuan dan potensi yang baik disetiap lingkungannya. Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi dalam Peraturan Gurberbur Nomor 155 Tahun 2015 Pasal 6 meliputi:

- 1) Pemetaan kebutuhan
- 2) Pengkajian
- 3) Uji coba
- 4) Pengembangan
- 5) Pemasyarakatan,dan
- 6) Pemanfaatan.

Upaya yang dilakukan oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam pemberdayaan masarakat melalui teknologi tepat guna yang di ungkapkan menurut Madikanto dan Soebianto (2012:170) ada 5 tahap yaitu:

- a) Pengembangan sumberdaya manusia.
- b) Pengembangan kelembagaan kelompok.
- c) Pemupukan modal masyarakat.

- d) Pengembangan usia produktif.
- e) Penyediaan informasi tepat guna.

Dari penjelasan diatas menurut Akil (L,45th) dengan adanya program posyantek ini bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, pemberdayaan masyarakat harus diperhatikan sekali oleh pemerintah untuk mengurangi lapangan pekerjaan maupun menaikkan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta melalui posyantek dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui posyantek yang dilakukan oleh DPPAPP Provinsi DKI Jakarta membantu masyarakat dan pengurus posyantek agar dapat memahami dari manfaat adanya lembaga posyantek disuatu lingkungan masyarakat. Sasaran yang berhasil dirasakan masyarakat dengan adanya posyantek banyak penemuan-penemuan terbaru dari masyarakat yang difasilitasi oleh posyantek. Sasaran program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti yaitu With (L,60th) selaku ketua RW 06 Taman Aries, pemberdayaan yang dilakukan posyantek terhadap masyarakat sangat baik untuk lingkungan.

Penemuan terbaru dan pengembangan teknologi yang menjadi sasaran program posyantek membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dilingkungannya. Posyantek tegak dan mandiri dengan bantuan dari DPPAPP DKI Jakarta dan ada pihak ketiga yang membantu untuk menemukan dan mengembangkan teknologi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan perbaikan lingkungan dan meningkatkan ekonominya. Dengan adanya posyantek sangat membantu masyarakat melakukan peningkatan usaha sehingga kegiatan

yang masyarakat lakukan menjadi lebih baik. Sebelum mengenal posyantek ini masyarakat melakukan usaha sangat memakan waktu yang lama karena teknologi yang masih manual.

Selanjutnya sasaran program posyantek membuat kegiatan masyarakat yang lebih efisien dan efektif, dapat memberikan nilai tambah suatu produk yang dihasilkan dalam kegiatan masyarakat. Melihat model implementasi George C. Edward III, (1980:148) terdapat aspek komunikasi. Aspek komunikasi tersebut menekankan pada komunikasi dari lembaga ke lembaga lain. Pada program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat telah memperjelas model implementasi Edward III digunakan pada kenyataan Saiful (L,47th) yang menjelaskan DPPAPP selalu berhubungan dengan posyantek yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk mempromosikan dan memasarkan hasil kegiatan posyantek dalam memberdayakan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan program posyantek membuat seminar atau perkumpulan kepada seluruh ketua posyantek Provinsi DKI Jakarta dan memberi informasi pameran-pameran di daerah maupun nasional. Menurut Theresia et. al, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya tergantung pada efektivitas komunikasi antara fasilitator dan masyarakatnya.

Keberhasilan posyantek tergantung pada keseriusan pemerintah yang secara aktif mengambil keputusan dan pelaksana pemberdayaan masyarakat, namun masyarakat sebagai pelaku utama penerima manfaat berperan karena dapat memilih untuk menerima atau menolak pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu untuk dapat mendapat keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat melalui

teknologi tepat guna yang dilakukan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta melalui posyantek dalam merencanakan program, merumuskan program, dan pelaksanaan program harus melibatkan masyarakat. Jadi nantinya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna berjalan secara maksimal. Seperti apa yang dijalankan dengan prinsip pemberdayaan menurut Anwas (2013:58-60), Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulamam pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya. Maka dari itu, dapat disimpulkan dampak dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan DPPAPP melalui posyantek hendaknya dilakukan dan ditanggapi keseriusan pemerintah maupun masyarakat. selanjutnya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar lembaga posyantek dengan baik dapat mensukses pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Implementasi Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) Dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Setiap pelaksanaan program kegiatan di sebuah organisasi tentu tidak terlepas adanya faktor pendukung dan penghambat. Begitu juga dengan program kegiatan posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Beragam jenis kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pasti menimbulkan suatu keadaan yang tidak dapat terduga. Dari keadaan-keadaan yang tidak dapat terduga tersebut, timbulah faktor pendukung serta faktor penghambat

dalam pelaksanaan program terhadap masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Faktor pendukung merupakan suatu yang harus dipertahankan serta ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan faktor penghambat merupakan suatu tantangan bagi sebuah organisasi terutama untuk program itu sendiri.

a. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung dipengaruhi oleh beberapa variabel implementasi seperti yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut analisis dari temuan-temuan dilapangan tentang faktor pendung berdasarkan variabel-variabel implementasi tersebut:

1) Komunikasi

Faktor pengaruhnya komunikasi yang baik di dalam lapangan program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mampu mempersinergikan stakeholder dan para pelaku implementasi yang terlibat. Pada komunikasi yang baik antara DPPAPP, PosyanteK, dan kelompok masyarakat telah mendukung implementasi program posyanteK dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berjalan dengan sesuai rencana dan tujuan program. Cara berkomunikasi pihak DPPAPP yang tidak hanya melibatkan staf atau pengurus posyanteK namun juga terlibat media sosial untuk memantau perkembangan posyanteK-posyanteK yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini menggambarkan tentang bagaimana proses implementasi yang tidak ada lagi berifat top down lebih kepada arah bottom-up. Selain pada setiap implementator yang merupakan wujud dari cara penyampaian informasi-informasi terkait program

pemberdayaan masyarakat kepada implementator agar mereka dapat memiliki interpretasi yang sesuai dengan teknis pelaksanaan agar tujuan dari program tersebut tercapai.

2) Sumber daya

Faktor Pendukung dari sisi sumber daya yang berperan di dalam implementasi program baik internal maupun external DPPAPP teridentifikasi ke dalam dua variabel, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Adanya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor pendukung dikarenakan pelaksanaan program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Sejalan dengan itu teknologi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Di era maju seperti ini masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi agar dapat meningkatkan daya saing dari pengelolaan sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu sumber daya manusia harus mempunyai hubungan baik agar bisa menjalankan implementasi secara baik dan mencapai tujuan, antara DPPAPP dan pengurus posyanteK harus bersinergi agar komunikasi yang dibangun tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah finansial yang ditetapkan untuk program posyanteK ini regulasi dari pemerintah daerah, karena program ini berawal dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2015 dana yang keluar hanya 100 ribu rupiah untuk melakukan kegiatan atau program posyanteK. Sedangkan dukungan dari external adalah dukungan pelaku usaha-usaha yang ada disekitar masyarakat kecamatan maupun kelurahan.

3) Disposisi

Menurut Goerge C Edward III (1980:148) disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementator sehingga apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator akan dapat melaksanakan kegiatan program sesuai dengan ketentuan dan tujuan program. Temuan terkait disposisi implementator di dalam implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta bila dilihat dari lapangan cukup positif. Kesadaran dan karakteristik implementator yang juga masyarakat setempat membuat menyadari tentang pentingnya program posyantek untuk pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan ekonomi mereka. Karena program posyantek ini untuk kepentingan mereka dalam menjaga lingkungan sekitar, kesadaran mereka pun juga besar untuk memahami program ini karena untuk mereka program ini diadakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sangat berpengaruh dalam proses dilapangan program posyantek karena berjalannya program ini dapat diukur dari seberapa berjalannya struktur birokrasi posyantek di setiap kecamatannya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. dengan aktifnya masyarakat dalam program ini juga memudahkan struktur birokrasi yang ada di posyantek, dikarenakan posyantek itu lembaga sosial yang sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat. Struktur birokrasi posyantek ini yang menjalankan masyarakat dari ketuanya pun masyarakat. Oleh sebab itu stuktur birokrasi yang baik dibutuhkan di program posyantek agar dapat menjalankan implementasi dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Variabel dalam menganalisis faktor penghambat sama halnya dengan analisis variabel faktor pendukung. Faktor penghambat dalam implementasi program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut hasil dari temuan-temuan dilapangan faktor penghambat berdasarkan variabel implementasi yang ada:

1) Komunikasi

Identifikasi dilapangan menunjukan masih adanya kesalahpahaman dalam memperkenalkan program ini dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat. komunikasi dilakukan untuk dapat menjadikan tujuan dan sasaran program dapat direalisasikan dengan target yang kemudian untuk mengurangi kesalahan dalam implementasi. Kesalahan dilapangan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami program posyanteK dan kurangnya mekanisme terhadap koordinasi yang dilakukan DPPAPP dengan lembaga posyanteK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengenalan program posyanteK ini berawal dari DPPAPP yang kurang inovasi dalam bentuk mengenalkan posyanteK dilingkungan masyarakat. hal ini juga terkait hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang masih kurang koordinasi dalam melakukan komunikasi. Hal ini terjadi pada pemerintah daerah yang masih kurang paham dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dikarenakan dari awalnya Kementrian Dalam Negeri sekarang menjadi Kementrian Desa yang

sebenarnya mengatur perdesaaan kalo untuk di daerah lainnya selain di DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta perkotaan bukan perdesaan. Pada dasarnya kesalahan implementasi ini tidak perlu terjadi apabila pada awal perencanaan dan koordinasi mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan segala macam mekanisme seperti temuan peneliti tersebut.

2) Sumber Daya

Faktor penghambat dalam implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah masih banyak masyarakat yang belum tau tentang posyantek terhadap teknologi tepat guna. Sesuai dengan teori (Anwas,2013:86) menumbuhkan lembaga non formal dalam masyarakat. Hal itu terbukti bahwwa masyarakat masih banyak yang belum paham terhadap pengetahuan apa itu posyantek dan lenbih mengenal posyandu sesuai dengan penuturan Saiful (L,47th). Sejalan dengan itu menurut Theresia dkk (2014:153-154), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk pernaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyaarakat Hasil yang kurang maksimal darai pemberdayaan masyarakat, lebih terbukanya pengurus posyantek, wartek dan kelompok masyarakat dalam penerima manfaat dari pemberdayaan masyarakat melalui posyantek melalui pemerintah. Kurang terbukanya dan pastisipasi masyarakat ini sangat berpengaruh untuk program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan di Provinsi DKI Jakarta. Menurut Mahlida (2012:15) menggunakan teknologi tepat guna mempunyai beberapa keuntungan diantaranya, lebih murah, dapat dibuat secara lokal, ramah

lingkungan, dan keikutsertaan masyarakat yang tinggi. Penjelasan diatas menjadikan bukti bahwa perlu sekali partisipasi masyarakat untuk membantu program pemerintah agar tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat dalam program posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Berjalannya program posyanyek dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai salah satu kendala yang mungkin menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan merupakan sumber penting dalam melaksanakan program, besar kecilnya anggaran menjadi faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis juga sistem pengangguran, dapat menghambat pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian dilapangan, semenjak tahun 2016 posyantek tidak dapat anggaran dana melalui pemerintah melainkan dana pribadi posyantek tersebut. Dalam Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi Provinsi DKI Jakarta, tidak ada pendanaan dari pemerintah sehingga pemberdayaan masyarakat melalui posyantek mendapatkan faktor penghambat untuk menjalankan program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak memberikan dana kepada posyantek seharusnya di ubah untuk kelancaran pemberdayaan masyarakat. Permasalahan klasik pada setiap program adalah dukungan dana yang harus di perhatikan, pemerintah harus mengatasi permasalahan anggaran agar dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat.

3) Disposisi

Dari hasil identifikasi lapangan tidak ditemukan disposisi yang negatif terkait karakteristik yang dimiliki implementator lapangan yang dapat menghambat implementasi program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Pada dasarnya implementator memiliki kesadaran dan karakter yang sama dalam mencapai tujuan dan sasaran program posyanteK dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari program posyanteK sendiri.

4) Struktur Birokrasi

Di dalam implementasi program struktur birokrasi memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP (*Standard Operating Procedures*), SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Faktor penghambat pertama didalam struktur birokrasi adalah perencanaan pelaksana, dan pengawas program dilakukan oleh lembaga posyanteK yang telah dibuat oleh masyarakat dengan bimbingan DPPAPP berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 Tahun 2015 tentang pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna TTG). Hal ini yang kemudian membuat program posyanteK yang dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi anggota lembaga posyanteK sudah benar. Namun ini juga jadi penghambat karena tidak semua masyarakat dapat melakukan jabatan lembaga

posyantek dengan benar karena lembaga sosial. Oleh sebab itu sering terjadi rangkap jabatan di setiap posyantek yang berkagori aktif dikarenakan ketua yang sibuk lalu sekertarisnya yang melaksanakan tugasnya. Selain itu penghambat lembaga posyantek untuk kategori aktif , dan tegak itu hanya menunggu dan tidak ingin melakukan dengan mandiri supaya lembaga posyantek dapat berjalan dengan semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa aspek yang menjadi fokus pembahasan mengenai implementasi posyantek (pos pelayanan teknologi) dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna yang merupakan program pemerintah yang dilakukan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta. DPPAPP diinstruksikan untuk menyediakan atau memfasilitasi lembaga posyantek dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 yang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pedudu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 335/2013 tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013-2017. Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama satu tahun periode yang berisi program dan kegiatan implementasi program pemberdayaan melalui posyantek (pos pelayanan teknologi) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2017.
2. Tujuan dalam pelaksanaan program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta adalah tujuan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna untuk

meningkatkan ekonomi dan mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasi posyantek di Provinsi DKI Jakarta, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta telah membuat kebijakan yaitu menerapkan posyantek pada 44 kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, membagi posyantek menjadi tiga kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri, dan memberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu keberadaan posyantek di Provinsi DKI Jakarta selama ini sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu keberadaan posyantek disetiap kecamatan.

3. Sasaran program posyantek dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta telah mampu membuat masyarakat menemukan penemuan baru dan pengembangan teknologi dan efektivitas masyarakat, memberikan nilai tambah dan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Walaupun sasaran adanya posyantek belum banyak rasakan oleh semua masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan pengurus posyantek dan masyarakat masih banyak yang belum paham tujuan lembaga posyantek.
4. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Posyantek dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta:
 - a. Komunikasi

Faktor pendukung dalam implementasi program posyantek dengan adanya dukungan pemerintah pusat maupun daerah dengan mengeluarkan regulasi dalam pelaksanaan posyantek dikecamatan yaitu Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. Menjadi faktor pendukung komunikasi dalam penyampaian lewat perturan-peraturan atau payung hukum yang jelas. Pola komunikasi yang dilakukan DPPAPP juga harus jelas dalam menyampaikan informasi agar dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat dan mecapai sasaran dan tujuan program. Hanya saja dari segi komunikasi ini memiliki temuan yang sedikit menghambat implementasi program yaitu adanya kurang pemahaman masyarakat terhadap program pos pelayanan teknologi (posyantek).

b. Sumber daya

Faktor Pendukung dalam implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sumber daya masyarakat yang ingin mengelola sumber daya lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat. Penghambat dalam implementasi program posyantek dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat masih banyak pengurus posyantek dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta masih kurang aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya, kurangnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan lembaga posyantek, dukungan dana yang menjadi masalah klasik pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan.

c. Disposisi

Faktor pendukung yang paling berkontribusi muncul dari disposisi setiap implementator yang terlibat di dalam program ini. Kesadaran dan karakteristik implementator yang juga masyarakat setempat membuat mereka menyadari tentang pentingnya program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Dengan masyarakat yang tidak sadar dengan program posyanteak ini itulah yang menjadi penghambat didalam Disposisi.

d. Struktur Birokrasi

Dengan terlibatnya masyarakat di dalam program posyanteak lebih efisien dan mempermudah dalam melakukan implementasi pemberdayaan masyarakat. kemudian penghambat dari sini kurangnya lembaga posyanteak yang mandiri dalam implementasi program ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang posyanteak. Struktur birokrasi di setiap posyanteak Provinsi DKI Jakarta harus lebih diperhatikan oleh DPPAPP agar bisa menjalankan implementasi dan mencapai tujuan serta sasaran.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat peneliti akan mencoba memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan program posyanteak agar lebih baik ke depannya:

1. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap kegiatan posyanteak mempengaruhi pelaksanaan posyanteak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya kajian ulang dalam kebijakan posyanteak agar dapat

mecapai tujuan yang sejahtera untuk masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam memperkenalkan Teknologi Tepat Guna (TTG) akan mempermudah penyampaian cara kerja TTG ini sendiri. Sehingga lebih mudah untuk memberdayakan masyarakat melalui TTG dengan melihat hasil akhirnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selalu berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mulai dari kelurah, kecamatan sampai KPMP tingkat walikota merupakan kunci untuk dapat dengan mudah mengembangkan dan menjalankan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Posyantek.
3. Pelaksana pemberdayaan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta melalui posyantek hendaknya di buat inovasi-inovasi program, kegiatan dan kebijakan, sehingga sasaran dan tujuan DPPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam rencana strategis dapat mencapai kinerja program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek. Dalam memberikan arahan pemerintah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat sehingga masyarakat paham dan mengerti tujuan dari posyantek. Selanjutnya, masyarakat harus lebih menyadari dan terbuka dengan keberadaan posyantek sehingga masyarakat merasakan pemberdayaan masyarakat melalui program posyantek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: penerbit Alfabeta
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta .
- Apriliani, dkk. 2014., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Adi, Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, William N. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Grindle, Merille Serril. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. New Jersey.
- Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Operasional Pos Pelayanan Teknologi.
- Jakarta Dalam Angka Provinsi DKI Jakarta 2012-2016
- Kaho, Josef Riwu., 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kuncoro, Mudrajat., 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. YKPN Yogyakarta: UPP STIM.
- Mahlinda. 2012. Pengembangan Teknologi tepat Guna Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Aceh* Vol. 3 Hal. 43-52
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication Ltd.

- Moleong, Lexi J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nababan, Rosma. 2012. Administrasi Publik Dalam Wujud Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Darma Agung*. Medan. Hal (1-15)
- Panduan Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
- Pasolong, Harbani., 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Pedoman Umum Pengelolaan Pelayanan Teknologi Tepat Guna.
- Prasetyo dkk. 2012. *Implementasi Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat : Peluang, Strategi dan Tantangan*. Jakarta : B2PTTG-LIPI.
- Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- Posyantek:: Pos Pelayanan Teknologi Diakses melalui <http://posyantek.org/> (diakses pada tanggal 7 November 2014).
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.
- Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2016..
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik.*, Bandung :Alfabeta..
- Sumodiningrat ,Gunawan, 2002, *Memberdayakan Masyarakat Perencana*. Jakarta: Kencana Nusadwina.
- Suryono dan Nugroho, 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang : FIA UB Malang.
- Suwahyo dkk. 2000. *Identifikasi Kebutuhan Pengembangan TTG di beberapa Desa yang Terkena Dampak Krisis Ekonomi*. Semarang: LPM UNNES.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tetang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tanaka, Nao. 2012., *Teknologi Tepat Guna dan Dunia Alternatif*. Jakarta .

LAMPIRAN I

SURAT IZIN RISET FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 004 /UN.10.F03.11.11/PN/2017
 Lampiran : -
 Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala
 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 Provinsi DKI Jakarta
 Jln. Raya Bekasi, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Abdul Risyad
 Alamat : Komplek Karyawan TMII Jln. Laksamana RT 12/04
 No.10 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
 NIM : 135030107113023
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi
 (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan
 Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

Lamanya : 2 (dua) bulan
 Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 8 Juni 2017
 a.n Dekan
 Ketua Prodi Administrasi Publik


 Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si
 NIP. 19690524 200212 2 002

LAMPIRAN II

SURAT IZIN PENELITIAN UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR: 8536 / 16.3 / 31.75.00.000 / 1.862.9 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desti Ernarningsih, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : ABDUL RISYAD

NIK : 3175100504940004

Alamat : Jl. Al Amin RT/RW. 06/06
Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pekerjaan : Mahasiswa

Instansi / Lembaga : Universitas Brawijaya

Alamat Instansi / Lembaga : Jl. Veteran
Kel. Lowokwaru, Kec. Sumber Sari
Kota Malang, Jawa Timur 65141

Untuk melaksanakan survey / penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

Instansi / Lembaga Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Bidang Penelitian : Sosial

Lokasi Penelitian : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Waktu Penelitian

a. Mulai : 12 Juli 2017

b. Berakhir : 04 Agustus 2017

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek penelitian.
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah / wilayah / lokus penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topic / judul penelitian sebagaimana dimaksud di atas.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penelitian, supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan / Kantor PTSP penerbit izin.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 12 Juli 2017

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN III

SURAT KETENTUAN PENELITIAN

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA (DPPAPP) Jalan Raya Bekasi Timur KM 18 Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur Telepon : (021) 22861988, Fax. (021) 22861051 Website : http://dppapp.jakarta.go.id E-mail : dppapp@jakarta.go.id J A K A R T A	
	Kode Pos : 13250	

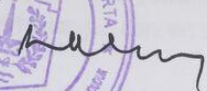
Nomor	: 3556/-1.851.8	17 Juli 2017
Sifat	: Segera	
Lampiran	:	
Hal	: Persetujuan Riset.	Kepada Yth. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di Malang

Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 8044/UN.10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 8 Juni 2017, hal Permohonan Riset :

N a m a	: Abdul Risyad
NIM	: 135030107113023
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Program	: Sarjana Strata 1
Program Study	: Ilmu Administrasi Publik

pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima Permohonan Riset yang bersangkutan dilingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *"Implementasi Program Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta"* selama 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 17 Juli s.d 7 Agustus 2017, lokasi penelitian di Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
 Anak dan Pengendalian Penduduk
 Provinsi DKI Jakarta,

 dr. Dien Emawati, M. Kes
 NIP. 195802271984102003

LAMPIRAN IV

**DOKUMENTASI PENELITIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA**



LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PENELITIAN PADA POSYANTEK KEMBANGAN

JAKARTA BARAT DAN POSYANTEK JAGAKARSA JAKARTA

SELATAN







LAMPIRAN VI

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana implementasi program pos pelayanan teknologi di provinsi dki jakarta?
2. Apa tujuan dari program pos pelayanan teknologi ? apakah sudah tercapai ?
3. Latar belakang program posyantek?
4. Selama berjalannya penerapan posyantek di DKI Jakarta adakah peningkatan dalam pertambahan lapangan pekerjaan ?
5. Adakah SOP program posyantek atau acuanya hanya Pergub DKI 88 tahun 2011?
6. Bagaimana dampak program posyantek ini dalam bidang ekono, sosial, dan lingkungan?
7. Bentuk konkret dari pemberian pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG ?
8. Pemberi bantuan dana pemanfaatan TTG ada 2 (hibah dan dana bergulir) ini seperti apa bentuk konkretnya?
9. Arah pemberdayaan masyarakat melalui posyantek ada 4, selama ini Dinas pemberdayaan, perlindungan anak dan penduduk lebih ke arah mana ? (peningkatan mutu umkm, mengurangi kerusakan lingkungan, pengolahan sampah, peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat)
10. Dengan adanya konsultasi, bagaimana implementasi dan harapannya ?
11. Dalam pergub disebutkann camat mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, namun kenyataannya ada beberapa posyantek yang hanya berstatus aktif. Bagaimana tindakan Dinas pemberdayaan, perlindungan anak dan penduduk karena camat belum menjalankan secara maksimal tupoksinya ?

12. Peran Dinas pemberdayaan, perlindungan anak dan penduduk dalam mengkoordinasikan posyantek dan wartek ?
13. Adakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
14. Bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
15. Seberapa sering atau intensitas monitoring dan evaluasi dilakukan ?
16. Apa dan bagaimana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
17. Bagaimana Dinas pemberdayaan dalam mengatasi dan menyelesaikan program yang kurang berjalan dilapangan ?

Posyantek

1. Bagaimana posyantek di kecamatan ini ?
2. Bagaimana dengan kepengurusan posyantek di kecamatan ini ?
3. Dengan adanya posyantek dikecamatan ini, apakah ada perubahan dengan perekonomian dikecamatan ini ?
4. Posyantek pada kecamatan ini lebih ke arah mana ? (peningkatan mutu umkm, mengurangi kerusakan lingkungan, daur ulang sampah, penerima pelayanan berbasis teknologi)
5. Ada beberapa wartek pada kecamatan ini ?
6. Bagaimana koordinasi antara posyantek dan wartek yang ada pada kecamatan ini ?
7. Bagaimana pembagian tugas antara posyantek dan wartek ?
8. Rencana kerja dan anggaran diatur oleh pengurus, selama ini bagaimana implementasinya? Antara posyantek dan wartek juga seperti apa ?
9. Posyantek pada kecamatan ini sudah pernah ikut ajang nasional ? (jika sudah) bentuk TTG seperti apa yang ada pada kecamatan ini ?
10. Untuk biaya operasional posyantek ini, didapatkan dari mana ? (pemerintah atau usaha mandiri)

Program Posyantek dalam Rencana Strategis BPMPKB Tahun 2013-2017

Program	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)		Kondisi Awal 2012	Capaian Kinerja		
				2013	2014	2015
				Target	Target	Target
Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	1	Jenis TTG yang dikembangkan dan dimasyarakatkan	7	9	11	13
	A	Jumlah TTG yang dimasyarakatkan	56	66	76	86
	B	Jumlah sistem informasi posyantek	0	0	1	Implementasi
	2	Presentase masyarakat pengguna TTG yang mandiri	50	55	60	65
	A	Jumlah posyantek yang tegak dan mandiri	4	10	22	34
	a)	Tegak	3	8	19	30
		Mandiri	1	2	3	4
	b)	Jumlah wartek yang aktif	0	44	92	140
	B	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan TTG pengelolaan sumber daya lingkungan	100	345	440	500
	3	Presentase Pemanfaatan Bina Sosial PPMK yang sudah berusaha/ bekerja setelah mendapatkan pelatihan	5	15	27	41
	A	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendampingan program pemberdayaan masyarakat	0	52	104	156
	B	Jumlah komunitas RW yang ditingkatkan kemampuannya tentang pemberdayaan masyarakat	1489	1667	1996	2243

	C	Jumlah pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat yang mendapatkan pelatihan keterampilan	30.612	58.708	64.207	70.203
	D	Jumlah Sistem Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat yang dibangun	0	0	1	implementasi

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target kinerja pada tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan TTG	Jenis TTG yang dikembangkan dan dimasyarakatkan	9 Jenis TTG	11 Jenis TTG	13 Jenis TTG	15 Jenis TTG	17 Jenis TTG
			Presentase masyarakat pengguna TTG yang mandiri	55%	60%	65%	70%	75%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Presentase masyarakat pengguna TTG yang mandiri	15%	27%	41%	55%	70%
			Cakupan anggota lembaga musyawarah kelurahan yang aktif terlibat dalam penggerak	974 Anggota LMK	1.403 Anggota LMK	1.684 Anggota LMK	2.300 Anggota LMK	2.706 Anggota LMK

			an kegiatan gotong royong					
			Jumlah sarana yang dibangun/ direhab melalui dana Bina Fisik Lingkungan PPMK	8.652 Sarana	10.352 Sarana	12.352 Sarana	14.552 Sarana	17.052 Sarana

Tabel 7

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan

Renstra BPMPKB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2013	2014	2015	2016	2017
Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan, pemasyarakatan, dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jenis TTG yang dikembangkan dan dimasyarakatkan	Jenis TTG	9	11	13	15	17
	Jumlah TTG yang dimasyarakatkan		66	76	86	96	106

	Jumlah Sistem Informasi PosyanteK		-	-	1	Implementasi	Implementas
--	-----------------------------------	--	---	---	---	--------------	-------------

	Presentase masyarakat pengguna TTG yang mandiri	%	55	60	65	70	75
	Jumlah posyantek yang mandiri dan tegak		10	60	65	70	75
	Jumlah wartek yang aktif		44	92	140	189	267
	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan TTG pengelolaan Sumber Daya Lingkungan		345	440	500	625	625

--	--	--	--	--	--	--	--